

LAMPRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Sumber Data yang Digunakan untuk Mencari Faktor-faktor Dalam Membangun Model Dinamika Sistem Distribusi Minyak Solar

A. Berita Fenomena Krisis BBM di Indonesia

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan komoditas sangat vital bagi negara mengingat BBM digunakan sebagai bahan bakar atau energi sekaligus sebagai bahan baku industri (*feedstock*). Dalam kaitannya dengan BBM jenis minyak tanah untuk rumah tangga digunakan untuk memasak dan penerangan (lampu). Oleh karena itu, perlu dijamin adanya ketersediaan BBM di seluruh wilayah NKRI.

Pada kenyataannya, memasuki pertengahan 2005, masyarakat Indonesia dihadapkan pada fenomena adanya krisis energi dengan ditandai adanya kelangkaan penyediaan BBM. Dampak dari krisis BBM tersebut tampak dengan banyaknya kelangkaan pasokan BBM yang dialami oleh Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU-SPBU) di daerah-daerah.

Berikut adalah sebagian potongan media yang menggambarkan fenomena kelangkaan BBM di tengah masyarakat di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

a. Berita Pertama

Masih belum lancarnya suplai bahan bakar minyak ke berbagai provinsi, termasuk DKI Jakarta, menyebabkan antrean kendaraan terjadi di berbagai stasiun pengisian bahan bakar untuk umum, setidaknya di 13 provinsi. Masyarakat berharap masalah ini dapat segera diatasi. Provinsi yang suplai BBM-nya terganggu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Nanggroe Aceh Darussalam, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan.

Pemandangan yang tampak transparan adalah antrean panjang kendaraan bermotor yang membutuhkan bahan bakar premium. Tentang hal ini, sejumlah warga hanya bisa mendongkol. Publik mencemaskan kelangkaan BBM pada akhirnya akan membuat ekonomi rakyat semakin sulit. Sebagai contoh, nelayan di Indramayu (Jawa Barat) sudah mengeluhkan kelangkaan solar.¹

¹ Premium Masih Langka di Daerah. Masyarakat Berharap Suplai Segera

d. Berita Kedua

Kupang termasuk kota yang terparah mengalami kelangkaan BBM. Lima jam adalah waktu tercepat untuk mendapat kan bensin. Harga jualnya pun gila-gilaan, paling tidak lima kali lipat lebih tinggi dibandingkan harga normal. Jalan-jalan di Kupang pun berubah menjadi lengang. Lebih dari separuh jumlah pegawai memilih bolos karena kesulitan transportasi.²

Sepanjang 2004 -2005, krisis dan kelangkaan BBM juga terjadi di berbagai wilayah Provinsi Jawa Timur. Berikut sejumlah kasus kelangkaan BBM di Jawa Timur yang diangkat sejumlah media.

c. Berita Ketiga

Dalam sepekan terakhir, pasokan bahan bakar minyak jenis solar dan premium dari Depot Pertamina Kediri, Jawa Timur, menurun. Kondisi ini mengakibatkan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di bekas karesidenan Kediri, yaitu Blitar dan Nganjuk, krisis BBM. Bahkan, di beberapa SPBU terjadi antrian panjang berebut pengisian BBM jenis premium. Menurut sejumlah pengelola SPBU, mereka biasanya menerima pasokan BBM sebesar 16 ton per hari. Namun, belakangan ini pasokan itu melorot hingga setengahnya. Demikian penjelasan Sukarli, pengelola SPBU di Kediri, Jatim, baru-baru ini.

Di lain pihak, Kepala Depot Pertamina Kediri Sumintoro mengaku, pasokan BBM ke SPBU di wilayahnya tak ada masalah. Hingga kini, Sumintoro mengatakan, belum ada keluhan dari Pemerintah Kabupaten Bidang Perekonomian Kediri yang memonitor distribusi BBM. Sumitoro mengaku tidak tahu menahu kelangkaan BBM di sejumlah SPBU. Pasalnya, pihaknya tetap memasok 600 ton BBM per hari seperti biasanya.³

Teratasi.

www.kompas.co.id/Kompas. Online/Selasa, 05 Juli 2005.

² Tercekik Anggaran Minyak, *Tempo Interaktif*, Edisi. 20/XXXIV/11 - 17 Juli 2005.

³ BBM Mulai Langka di Kediri.www.Liputan6.com. 2005-06-23.

d. Berita Keempat

Stok bahan bakar untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur kritis. Persediaan bahan bakar hanya cukup untuk tiga hari, kata General Manager PLN Jawa Timur Hariadi Sadono, padahal stok aman minimal sepekan. Saat berdialog dengan pelanggan di Kediri, Rabu (6/7), Hariadi menjelaskan, ada tiga unit pembangkit listrik tenaga diesel, yakni Grati, Gresik, dan Tambak Lorok.

Kapasitas ketiga pembangkit itu mencapai 2.400 megawatt atau 12 persen kapasitas terpasang dalam sistem pembangkit listrik di Jawa Timur yang mencapai 14.500 megawatt. "Tanpa PLTD, Jatim hanya punya 12.100 megawatt. Jumlah itu tidak bisa mencukupi kebutuhan beban puncak listrik yang mencapai 13.400 megawatt. Kami akan memadamkan listrik secara bergilir," kata Hariadi kepada Tempo.⁴

e. Berita Kelima

Kelangkaan BBM, khususnya bensin, di Lamongan, Jawa Timur yang belum teratasi hingga kemarin, mulai berdampak terhadap para nelayan di Kota Soto tersebut. Mereka takut tidak bisa melaut gara-gara kelangkaan BBM tersebut, khususnya jenis solar dan minyak tanah. "Kami resah, takut tidak bisa melaut gara-gara tidak ada BBM," kata nelayan dari Weru Komplek Kecamatan Paciran, Jawahir kepada Radar Bojonegoro, kemarin.

Menurut dia, keresahan para nelayan tersebut terus meningkat karena minyak tanah sudah semakin sulit diperoleh. Para nelayan Lamongan sangat bergantung dengan minyak tanah, karena selama ini mereka memakai jenis BBM itu yang dioplos dengan oli untuk menggerakkan kapalnya melaut. "Kalau yang langka solar atau bensin tidak terlalu masalah, tapi kalau minyak tanah, kami jelas tidak bisa bekerja lagi," terangnya.

Menurut Jawahir anggota DPRD Lamongan dari FKB tersebut, para nelayan Lamongan selama ini sangat bergantung terhadap solar dan minyak tanah. Kedua jenis BBM tersebut biasanya dioplos (dicampur) untuk menggerakkan kapalnya saat melaut.⁵

⁴ Akibat Krisis Bahan Bakar. Listrik di Jawa Timur Akan Dipadamkan Bergilir. *Tempo*

Interaktif, Rabu, 06 Juli 2005 | 19:07 WIB.

⁵ Nelayan Lamongan Resah. Akibat Kelangkaan BBM. *www.jawapos.com*, Kamis, 16 Juni 2005.

f. Berita Keenam

Menyusul naiknya harga solar menjadi Rp 2.400 per liter, nelayan di kawasan kampung nelayan Pantai Sidem, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur berhenti melaut. "Kami tidak tahu jalan keluar apa yang harus diambil untuk mensiasati melambungnya harga solar. Dari pada mengambil resiko rugi karena hasil tangkapan nilainya tak bisa mencukupi menutupi pengeluaran solar, lebih baik kami tidak melaut," kata Musijan, salah seorang nelayan kepada Tempo, Rabu (2/3).

Menurutnya, dengan kenaikan harga solar pengeluaran menjadi bertambah. Terlebih di awal tahu seperti sekarang ini hasil tangkapan cenderung turun. Per hari, rata-rata mereka hanya mendapatkan ikan seberat 8 kilogram. Jika dijual hanya mendapatkan uang Rp 43ribu. Sementara kebutuhan solar yang dikeluarkan untuk sekali melaut mencapai Rp 10 liter.

Dengan harga solar per liter Rp 2.400 per liter, berarti dibutuhkan dana sebesar Rp 24.000 untuk BBM. Belum keperluan bekal selama di laut. Dengan banyaknya ongkos BBM yang dikeluarkan, hasil yang dicapai nelayan tak lebih dari Rp 10.000. "Jika harga solar tak juga turun, lebih baik kami mencari pekerjaan lain saja. Entah jadi buruh tani atau kuli," kata Musijan.⁶

g. Berita Ketujuh

Banyak pangkalan minyak tanah yang sudah sepekan ini tutup. Han Soleh (34 tahun) agen pangkalan minyak tanah di Blimbing, Kota Malang, mengaku sudah sepekan ini pasokan minyak tanah belum datang. Ia terakhir menjual minyak tanah dengan harga Rp 1.250/liter.

Banyak warga Kota Surabaya sibuk mencari minyak tanah sambil membawa jeriken. Sampai Selasa pagi bahan bakar ini masih susah dibeli di kampung-kampung. Karena langka ada pedagang minyak keliling yang mematok harga Rp 2.500/liter.

Agen besar minyak tanah di Jalan Kampung Malang Tengah, Surabaya, Andjar, mengatakan, pengiriman bahan bakar ini sering terlambat. Jatah dua tangki kecil biasanya habis dalam dua hari, tapi dengan langkanya minyak tanah dalam waktu dua jam sudah habis. Humas Pertamina UPDN V/ Jawa Timur, Syaiful Bachrie, mengatakan, ketidakcukupan minyak tanah di Surabaya dan sejumlah daerah lainnya

⁶ Tak Mampu Beli Solar, Nelayan Tulungagung Berhenti Melaut. *Tempo Interaktif*,

Rabu, 02 Maret 2005 | 21:35 WIB.

di Jawa Timur terjadi karena keterlambatan pasokan.

Dikatakan, pengiriman minyak tanah pada Kamis (30/6) dan Sabtu (2/7) untuk mencukupi kebutuhan hingga Senin (4/7) sedangkan kapal Asta Samudera yang Senin (5/7) membawa minyak sebesar 11.000 kiloliter untuk memenuhi kebutuhan sekitar 3 atau 4 hari mendatang.⁷

B. Penjelasan Institusional Masalah Krisis dan Penyelewengan BBM

1. Penjelasan Menteri ESDM

Atas terjadinya fenomena krisis BBM tersebut, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR-RI pada tanggal 12 Mei 2005, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Purnomo Yusgiantoro menjelaskan bahwa kelangkaan BBM khususnya minyak tanah dan minyak solar di beberapa daerah di Indonesia, antara lain di Kendari Sulawesi Tenggara dan Sungailiat, Bangka Belitung, antara lain disebabkan:

- Penyalahgunaan minyak tanah yang seharusnya digunakan untuk rumah tangga ternyata digunakan untuk keperluan lain, misalnya untuk industri, dioplos dengan minyak solar dan sebagainya.
- Kelangkaan minyak solar di Sungailiat, Bangka Belitung akibat meningkatnya kegiatan penambangan timah disebabkan tingginya harga jual pasir timah (Rp. 35.000 – Rp 37.000 per kilogram) di smelter.
- Penyelundupan minyak tanah ke luar negeri khususnya daerah perbatasan.
- Banyaknya penggunaan minyak tanah untuk motor nelayan maupun pompa pertanian dan pemanas di peternakan ayam.

Dalam tahun 2005 sudah ada beberapa daerah yang meminta tambahan alokasi minyak tanah seperti di Propinsi Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.⁸

⁷DPR Panggil Pertamina.

<http://www.suarapembaruan.com/News/2005/07/05/index.html>

Tue, 05 Jul 2005 16:48:22 -0700.

⁸ Bahan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR-RI, Tanggal 12 Mei 2005, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Jalan Medan Merdeka Selatan No: 18, Jakarta Pusat, hal 2 - 3.

2. Penjelasan Kepala BPH Migas

Pada rapat kerja gabungan tersebut, Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan BBM, ia mengatakan disebabkan oleh empat hal, yaitu disparitas harga, penyelundupan, pengoplosan dan penyalahgunaan fungsi BBM subsidi kepada pihak-pihak yang tidak berhak.⁹

Sesuai dengan UU No: 22 tahun 2001 jo Peraturan Pemerintah No: 36 Tahun 2004, peran BPH Migas adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa.¹⁰ Adapun faktor kelangkaan BBM adalah:

- Banyaknya kegiatan pengoplosan BBM yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan oplosan karena adanya disparitas harga antara minyak tanah dengan solar dan premium.
- Adanya modus penyimpanan penjualan minyak tanah ke industri untuk mendapat keuntungan yang lebih besar karena disparitas harga minyak tanah untuk rumah tangga dan industri.
- Penyelundupan minyak tanah ke luar negeri khususnya di daerah perbatasan
- Banyaknya penggunaan minyak tanah untuk motor nelayan maupun pompa pertanian dan pemanas di peternakan ayam.
- Peningkatan penggunaan BBM di luar pemaikan yang reguler, misalnya adanya tambang inkonvensional (TI) di daerah Bangka belitung menyebabkan kekurangan solar di SPBU, omprongan tembakau seperti di daerah NTB menyebabkan minyak tanah langka di masyarakat.

⁹ Catatan Rapat Kerja Komisi VII DPR-RI dengan Menteri ESDM, Meneg BUMN, Kepala BP Migas, Kepala BPH Migas, dan Dirut Pertamina pada Senin, 16 Mei 2005, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

¹⁰ Bahan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan BP Migas dan PT Pertamina (Persero) Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2004 – 2005, Tanggal 12 Mei 2005.

3. Penjelasan PT Pertamina (Persero)

Pengakuan pemerintah bahwa krisis BBM adalah akibat tindakan penyelewengan adalah tindakan maju. Krisis BBM yang semakin parah pada pertengahan 2005 ini sesungguhnya telah terjadi pada 2004. Pada saat itu, dalam Rapat Dengar Pendapat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dengan Komisi VII DPR RI. Persidangan II tahun Sidang 2004 – 2005. Tanggal 7 Desember 2004, PT Pertamina (Persero) yang bertanggungjawab dalam masalah distribusi BBM memberikan alasan teknis operasional berkaitan dengan hambatan yang terjadi dalam hal distribusi BBM.

Secara umum penyaluran menggunakan sistem reguler, alternatif dan emergensi (RAE). Terjadinya kelangkaan BBM di suatu lokasi dapat dijelaskan sebagai berikut:¹¹

1. Premium dan solar untuk SPBU.

Kelangkaan di beberapa SPBU secara kasuistis disebabkan karena keterlambatan suplai di depot *supply point* karena:

- Kerusakan tanker.
- Produksi kilang terkendala
- BBM impor yang terkendala
- Kendala alam, misalnya pasang surut dan bencana alam.

Untuk mengatasi kelangkaan maka perlu adanya alternatif pengalihan *supply point*. Sedangkan untuk emergensi maka penentuan prioritas penyaluran kepada sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti PLN, selanjutnya sektor transportasi seperti sales point di jalur utama.

2. Minyak Tanah.

Kelangkaan minyak tanah dapat disebabkan karena kekurangan supplay. Solusinya, alternatif, pengalihan *supply point* dan melakukan operasi pasar secara selektif dan berkoordinasi. Sedangkan pemecahan emergensi dilakukan prioritas penyaluran di daerah pemukiman padat yang sangat rawan terjadinya gejolak.

¹¹ Jawaban Susulan PT Pertamina (Persero) Atas Pertanyaan Lisan Komisi VII DPR RI (Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, Riset dan Teknologi, an Lingkungan Hidup) dalam Rapat Dengar Pendapat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dengan Komisi VII DPR RI. Persidangan II tahun Sidang 2004 – 2005. Tanggal 7 Desember 2004, hal 4.

C. Pengurangan Pasokan BBM oleh PT Pertamina (Persero)

Fenomena krisis BBM di atas tidak lepas dari kebijakan Pertamina untuk menurunkan stok BBM yang diberikan ke tiap SPBU tersebut. Kebijakan Pertamina untuk mengurangi jatah kepada SPBU-SPBU diatas dimaksudkan untuk memperketat distribusi bahan bakar minyak (BBM), dengan tidak melayani kelebihan permintaan. Langkah itu dilakukan untuk mengendalikan konsumsi minyak. Apabila terjadi kelebihan kuota permintaan, Pertamina yang harus menanggung harga pembelian BBM. Padahal, harga produk BBM terus melambung tinggi sampai akhir Juni 2005, sedangkan kondisi arus kas (*cash flow*) Pertamina dalam kondisi kritis. Sampai akhir Juni 2005, harga minyak mentah mencapai US\$ 58 per barel sedangkan harga produk BBM berkisar antara US\$ 65 hingga US\$ 70 per barel.

1. Hambatan *Cash Flow* PT Pertamina (Persero)

Kurtubi menuding Undang-Undang Migas yang terbit empat tahun lalu sebagai biang kerok tertatih-tatihnya Pertamina dalam mengimpor minyak. Dalam UU Migas itu, posisi Pertamina tak lagi membawahkan kontraktor produksi bagi hasil (KPS), maka Pertamina kehilangan hak mengutip uang retensi pemasaran dari KPS yang beroperasi di Indonesia.

Nilai pungutan itu cukup besar, Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun per tahun. Kutipan retensi itu yang menjadi tenaga dalam Pertamina saat mengimpor BBM di masa silam. "Karena ada retensi, penggantian subsidi BBM pada akhir tahun pun menjadi tidak masalah," ujar Kurtubi. Setelah tak ada retensi, Pertamina mengandalkan pinjaman dari bank untuk membayar kekurangan penggantian pemerintah.

Ada sembilan bank, empat di antaranya bank asing, yang membuka fasilitas surat kredit bagi Pertamina untuk mengimpor minyak. Total plafon pinjaman surat kredit US\$ 1,38 miliar atau Rp 12,97 triliun itu terlampaui pada triwulan pertama. Pada awal April silam, nilai fasilitas surat kredit yang digunakan Pertamina sebesar US\$ 1,628 miliar atau Rp 15,31 triliun.

Awal bulan ini, kantong Pertamina untuk mengimpor BBM tak berubah banyak. Sumber Tempo di kalangan keuangan mengingat surat kredit Pertamina yang masih tertunggak sekitar US\$ 150 juta. "Makanya kemarin ada keterlambatan pengiriman minyak," ujar sumber tersebut. Setelah fasilitas pinjaman dari bank melampaui plafon, praktis Pertamina harus mengandalkan uang dari pemerintah.

Di sini, kelangkaan mulai merebak. Situasi sempat keruh karena para pejabat di Departemen Keuangan yang berhak mencairkan uang anggaran saling lempar bola dengan para bos Pertamina. Di satu pihak, Pertamina menuding Departemen Keuangan lama mencairkan uang. Di pihak lain, Departemen Keuangan berkilah pencairan telah sesuai dengan proses.¹²

Kesulitan Pertamina dalam *cash flow* juga terungkap dalam RDP di DPR. Pada saat ini PT Pertamina (Persero) mengalami kesulitan cash flow, karena dalam APBN tahun 2005 subsidi BBM ditetapkan sebesar Rp 19 Triliun. Sedangkan dana subsidi tersebut diperhitungkan untuk pembayaran hutang kepada pemerintah sebesar Rp 14,9 Triliun dan yang sudah dipergunakan Pertamina sebesar Rp 5 Triliun sehingga berjumlah Rp 19,9 Triliun dan ada kemungkinan Departemen Keuangan tidak membayar subsidi karena menganggap Pertamina masih mempunyai hutang sekitar Rp 0,9 Triliun.¹³

Dalam usulan APBN-P 2005, subsidi BBM ditetapkan sebesar Rp 39 Triliun, maka diperkirakan subsidi BBM masih tersisa Rp 20 Triliun. Sedangkan perkiraan realisasi subsidi BBM 2005 sebesar Rp 90 Triliun, namun hal ini memerlukan persetujuan DPR RI.

Alternatif yang diusulkan Pertamina antara lain:

- Mengusulkan kepada pemerintah untuk memberlakukan kembali Keputusan Menteri Keuangan No.301/KMK.06/2004 tentang pembayaran subsidi BBM yang tidak mengacu APBN. Usulan tersebut telah mendapat persetujuan DPR dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2004.
- Sambil menunggu hasil audit, penggantian subsidi BBM bisa dimasukkan ke dalam *escrow account*. Dalam hal ini BPK bersedia membantu dengan catatan sudah dibicarakan dan disetujui terlebih dahulu oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan alternatif di atas, Pertamina mengusulkan pemberlakuan kembali Harga Patokan berdasarkan perhitungan MOPS + 15 persen bagi industri tertentu, meliputi:

- Pertambangan umum dan pertambangan migas
- Kegiatan pengolahan
- Perusahaan listrik swasta yang merupakan perusahaan PMA

¹² Tercekik Anggaran Minyak. *Tempo Interaktif*. Edisi. 20/XXXIV/11 - 17 Juli 2005.

¹³ Bahan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR-RI, Tanggal 12 Mei 2005, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Jalan Medan Merdeka Selatan No: 18, Jakarta Pusat, hal 3 - 4.

- Pemakaian sendiri (ex instalasi Depot).

Sebelumnya PT Pertamina dalam RDP dengan DPR, Pertamina mendapatkan keputusan kenaikan *fee* pengolahan dan distribusi, berdasarkan keputusan politik dari DPR.¹⁴ Kenaikan *fee* pengolahan dan distribusi dari sebelumnya masing-masing sebesar US \$ 0,20/ Bbl menjadi US \$ 0,33/ Bbl untuk *fee* pengolahan dan US \$ 0,42/Bbl untuk *fee* distribusi yang telah disetujui oleh DPR pada periode yang lalu (Komisi VIII), sampai saat ini belum dilaksanakan oleh Departemen Keuangan.

Berkaitan dengan pencairan subsidi BBM sebagai hasil dari keputusan politik DPR telah dituangkan dalam kep. Menkeu No: 301 tahun 2004. Dalam pelaksanaannya Direksi Pertamina telah mengajukan tagihan subsidi BBM bulanan selamatlambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya. Permintaan pencairan tersebut berdasarkan hasil perhitungan Satker Finek BBM, terdiri atas Depkeu, Dep ESDM, Pertamina dan BP Migas. Namun, waktu penyelesaiannya belum sesuai dengan yang diharapkan.

2. Koordinasi antar Departemen dan Instansi

Pemerintah menilai kelangkaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi akibat tidak mampunya Pertamina memenuhi keperluan BBM domestik hanya bersifat sementara. Hal ini disebabkan kelangkaan pasokan BBM yang ada bukan terkait masalah mendasar pengadaan BBM, melainkan lebih pada permasalahan koordinasi antara departemen terkait.¹⁵ “Saya sudah bicara dengan dirut Pertamina. Kelangkaan ini hanya temporal saja, sebab ni bukan masalah stok, tapi soal keterlambatan pembayaran subsidi oleh pemerintah,” jelas Sugiharto, Men BUMN di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, yang terjadi sebenarnya adalah mismatch antara waktu permintaan dana dari Pertamina dengan pengucuran oleh Depkeu. “Selisih waktu beberapa hari inilah yang menjadi penyebabnya minimnya pasokan BBM. Persoalannya, dalam selisih waktu tersebut harga minyak dunia melonjak, sehingga Pertamina menjadi kekurangan dana”.

¹⁴ Jawaban Susulan PT Pertamina (Persero) Atas Pertanyaan Lisan Komisi VII DPR RI (Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup) dalam Rapat Dengar Pendapat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dengan Komisi VII DPR RI. Persidangan II tahun Sidang 2004 – 2005. Tanggal 7 Desember 2004, hal 9.

¹⁵ Akhir Bulan Krisis BBM Teratasi. Stok Pekanbaru 11 Hari, Dumai 5 Hari. <http://www.riapos.com/web/content/view/11533/54/>.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Departemen Keuangan melalui dirjen perbendaharaan negara telah melakukan pembayaran Rp 4 triliun kepada Pertamina pada 15 Juni lalu. Namun, karena pembayaran tersebut telah terlambat, maka ada selisih yang harus ditanggung Pertamina akibat kenaikan harga minyak. Saat ini, Pertamina meminta Rp 5,2 triliun, dari yang sudah dibayarkan sebesar Rp 4 triliun. Mengenai keterlambatan tersebut, pihak Depkeu berdalih karena secara prosedural Pertamina belum menyampaikan surat permintaan pembayaran.

Mengenai permintaan Rp5,2 triliun dari Pertamina ini, Sugiharto menyatakan bahwa sidang kabinet sedang mempertimbangkan adanya *review* terhadap besaran subsidi yang diberikan terkait dengan kenaikan harga minyak dunia. “Semua angka-angka yang diajukan baik itu untuk subsidi maupun harga kan itu harus di-*review* secara detil. Karena UU APBN mengharuskan menkeu punya komitmen untuk membayar, sedangkan volumenya diasumsikan melalui APBN.”¹⁶

Jika menyimpang dari itu, kata dia, harus dilakukan penelaahan terlebih dahulu. Jadi tidak hanya menerima begitu saja permintaan Pertamina. Mereka juga harus diinternal audit dulu. Untuk audit historikal itu biasanya oleh BPK,” jelasnya. Prinsipnya, kata dia, sebagai pertimbangan dalam UU APBNP diperlukan adanya penelaahan dan penyesuaian agar ketersediaan BBM ini cukup.

Menurutnya, RAPBNP sementara ini mengasumsikan 45 dolar AS per barel dari yang sebelumnya 35 dolar AS per barel. “Sekarang harga sudah USD 58-59 per barel. Inilah mengapa kabinet minimal tiap minggu membahas perkembangan harga minyak dan dampaknya terhadap subsidi”. Pemerintah, kata dia, memang harus mengambil keputusan secara tepat.

Mengenai rencana pemerintah, pemerintah berencana memberikan dana subsidi per bulan sebesar Rp1,5 triliun,”Tapi itu angka minimal. Ada kemungkinan bisa dinaikkan jika melihat tren kenaikan harga BBM yang cukup tinggi ini.”

Koordinasi yang lemah sebenarnya menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Koordinasi yang lemah antar instansi yang bertanggungjawab dalam proses distribusi BBM menjadi salah satu contoh faktor penyebab semakin panjangnya time lag atau *delay* yang menyebabkan kelangkaan semakin berlarut-larut untuk dapat diatasi dengan baik. Salah satunya dapat dilihat pada Catatan Rapat Raker Komisi VII DPR-RI dengan Menteri ESDM, Meneg BUMN, Kepala BP

¹⁶ *Ibid.*

Migas, Kepala BPH Migas, dan Dirut Pertamina pada Senin, 16 Mei 2005.¹⁷

Raker tersebut mengagendakan lima masalah, yaitu:

- Perkembangan harga minyak dunia tahun 2005.
- Perkembangan dan prospek produksi minyak dan gas bumi Indonesia 2005.
- Kelangkaan BBM di beberapa wilayah di Indonesia.
- Kesulitan *cash flow* PT Pertamina (Persero)
- Masalah PT Pupuk Iskandar Muda.

Dalam pengantarnya, Ketua Rapat memberitahukan bahwa telah diterima surat dari Departemen Keuangan RI yang mengatakan bahwa Menteri Keuangan berhalangan hadir dalam Rapat Kerja dan mengirim Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Direktur Penerimaan Negara bukan Pajak dan Badan Layanan Umum Departemen Keuangan.

Kondisi serupa juga terjadi karena Meneg BUMN juga tidak hadir dalam rapat dan mengirim Deputi Bidang Usaha Pertambangan Energi dan Telekomunikasi serta Industri Strategis Kementerian BUMN untuk mewakilinya.

Ketidakhadiran Menteri Keuangan dan Meneg BUMN menyebabkan Rapat Kerja gagal dilanjutkan untuk membahas sejumlah persoalan yang membutuhkan persetujuan kedua menteri tersebut, misalnya masalah yang berkaitan dengan *cash flow* Pertamina yang membutuhkan penjelasan dan persetujuan Meneg BUMN.

D. Konsumsi, Produksi, dan Ekspor Minyak Mentah Indonesia

1. Konsumsi BBM di Indonesia

Saat ini keperluan BBM dalam negeri adalah sekitar 1,4 juta barel per hari (bph) sedangkan produksi BBM dalam negeri hanya berkisar 1 juta bph artinya pemerintah harus mengimpor BBM sebanyak 400 ribu bph.¹⁸

¹⁷ Catatan Rapat Kerja Komisi VII DPR-RI dengan Menteri ESDM, Meneg BUMN, Kepala BP Migas, Kepala BPH Migas, dan Dirut Pertamina pada Senin, 16 Mei 2005, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

¹⁸ Akhir Bulan Krisis BBM Teratasi. Stok Pekanbaru 11 Hari, Dumai 5 Hari. <http://www.riapos.com/web/content/view/11533/54/>

Kondisi faktual inilah yang menyebabkan Pertamina memutuskan menerapkan strategi dengan memilih bersikap mengontrol konsumsi minyak. Pertamina tidak ingin melanggar kuota yang sudah disepakati antara Pertamina, pemerintah, dan DPR karena setiap kali melebihi kuota, Pertamina lah yang harus menanggung biaya kelebihannya.

Pengadaan minyak mentah untuk keperluan kilang didapat dari beberapa sumber, antara lain:¹⁹

- Minyak mentah produksi Pertamina sendiri
- Minyak mentah bagian dari pemerintah (dari kontraktor dari bagi hasil).
- Minyak mentah dari kontraktor yang dibeli.
- Minyak mentah import.

Efisiensi pengelolaan kilang selalu dimonitor dengan menggunakan metode UKT dan melalui *benchmarking* dengan kilang lain. Berdasarkan *benchmarking* yang dilakukan oleh ShellGlobal Solution, biaya pengolahan Kilang Pertamina masih berada di bawah biaya pengolahan rata-rata Kilang Dunia. Kondisi itu dapat dilihat pada tabel berikut:²⁰

Processing cost (US \$/Bbl)

	Tahun 20001	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003
<i>Benchmark</i>	2,50	2,50	2,50	2,73
Total Pertamina	2,33	1,97	2,27	2,46

Biaya kilang pada umumnya diukur dengan US \$/Bbl (Jumlah biaya dibagi dengan banyaknya minyak mentah yang diolah. Besaran ini berbeda-beda antara kilang satu dengan kilang lainnya dan akan tergantung atas kompleksitas kilang.

Secara nasional kebutuhan harian untuk BBM mencapai 178 ribu kilo liter dengan kebutuhan terbesar adalah Solar sebesar 74 ribu kilo liter, Premium 44 ribu kilo liter dan Minyak Tanah dengan tingkat

¹⁹ Jawaban Susulan PT Pertamina (Persero) Atas Pertanyaan Lisan Komisi VII DPR RI (Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, Riset dan Teknologi, an Lingkungan Hidup) dalam Rapat Dengar Pendapat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dengan Komisi VII DPR RI. Persidangan II tahun Sidang 2004 – 2005. Tanggal 7 Desember 2004, hal 6.

²⁰ *Ibid*, hal 10.

konsumsi 32 ribu kilo liter per hari. Konsumsi terbesar masih didominasi wilayah pemasaran III DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dengan kebutuhan harian mencapai 54 ribu kilo liter, disusul wilayah V Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT sebesar 35 ribu kilo liter, dan wilayah I Nangro Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebesar 25 ribu kilo liter per hari.

Permintaan atas BBM di dalam negeri terus tumbuh mencapai rata-rata sekitar 5 persen setahun. Pertumbuhan permintaan tersebut, misalnya dapat dilihat secara kasar mata dengan tumbuhnya penjualan kendaraan bermotor selama empat tahun terakhir. Tahun 2004 misalnya, peningkatan penjualan mobil mencapai dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Permintaan atas minyak selama ini berlari lebih kencang daripada pasokan. Di luar negeri, permintaan yang berlebihan mendorong harga kontrak minyak di bursa komoditas untuk mendaki selama 18 bulan terakhir. "Ini merupakan periode kenaikan harga minyak terpanjang," ujar Martiono Hadianto, Komisararis Utama Pertamina.

Tren seperti itu diabaikan oleh pejabat pemerintah, yang menyusun anggaran, dan juga anggota DPR, yang mengesahkan anggaran. Alasannya, untuk meringankan beban subsidi BBM yang harus ditanggung oleh anggaran. Jangan lupa, lebih dari separuh harga jual BBM di dalam negeri ditanggung oleh pemerintah. Jika penggunaan BBM tak dibatasi—biasa disebut kuota—tentu pemerintah tak bisa memperkecil subsidi. Angka konsumsi BBM yang disepakati sepanjang tahun ini dikurangi lima pesen menjadi 59,6 juta kiloliter.

Selama lima bulan pertama tahun ini, asumsi anggaran terbukti meleset untuk premium dan minyak tanah. Bensin yang telah tersedot oleh mobil yang lalu-lalang mencapai 7,96 juta kiloliter atau lebih dari separuh jatah anggaran. Total BBM yang telah dikonsumsi hingga akhir Mei mencapai 25,36 juta kiloliter atau 43 persen.²¹

²¹ "Tercekik Anggaran Minyak". Tempo Interaktif. Edisi. 20/XXXIV/11 - 17 Juli 2005

2. Produksi Minyak Mentah di Indonesia

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR-RI dengan Menteri ESDM, Meneg BUMN, Kepala BP Migas, Kepala BPH Migas, dan Dirut Pertamina pada Senin, 12 Mei 2005, mengatakan:²²

Produksi minyak di dalam negeri mengalami penurunan yang luar biasa, salah satu sebabnya adalah 50 dari 60 produksi minyak dalam negeri tergantung pada produksi minyak di Sumatra Tengah, yaitu oleh PT Caltex Pasific Indonesia, namun PT Caltex Pasific Indonesia telah memberikan kesanggupan untuk dapat mengurangi penurunan produksi walaupun secara alamiah minyak bumi akan mengalami penurunan produksi karena minyak bumi merupakan *debitable resources*.

Produksi minyak bumi dalam negeri rata-rata mencapai 1,1 juta barel per hari yang terdiri atas produksi minyak bumi dan produksi kondensat.

Penurunan angka produksi minyak tahun 2004, sesuai dengan tren yang terjadi dua tahun sebelumnya. Tahun 2003 tercatat rata-rata produksi minyak mencapai 1,149 juta barel per hari. Sedangkan tahun 2002 produksi bisa sampai 1,2 juta barel per hari.

Menghadapi kenyataan ini, pemerintah harus tetap mengedepankan aspek-aspek yang menguntungkan bagi bangsa dan negara secara jangka panjang. Salah satunya adalah bagaimana menyikapi kebijakan pemberian subsidi BBM yang selama ini dilaksanakan. Kebijakan ini ternyata tidak tepat sasaran, karena menimbulkan berbagai penyimpangan baik dalam pengadaan, penyaluran dan penggunaan BBM.

Perkembangan dan prospek produksi minyak dan gas bumi Indonesia tahun 2005.²³ Permasalahan produksi minyak, antara lain:

- Pencarian rig yang tidak mudah karena peningkatan kegiatan sehubungan harga minyak tinggi.
- Pembebasan lahan mengalami hambatan oleh masyarakat yang menuntut ganti rugi cukup tinggi.
- Tumpang tindih lahan antara kegiatan-kegiatan.
- Cadangan minyak yang ditemukan terbatas, volume cadangan relatif kecil (< 5 juta barel).

²² Catatan Rapat Kerja Komisi VII DPR-RI dengan Menteri ESDM, Meneg BUMN, Kepala BP Migas, Kepala BPH Migas, dan Dirut Pertamina pada Senin, 12 Mei 2005, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

²³ Bahan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR-RI, Tanggal 12 Mei 2005, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Jalan Medan Merdeka Selatan No: 18, Jakarta Pusat, hal 1.

- Kondisi reservoir yang semakin kompleks.

Rancangan jangka pendek untuk satu sampai tiga tahun. Sebagai upaya jangka pendek (1 – 3 tahun) untuk mengatasinya, antara lain:²⁴

- Meningkatkan produksi minyak dari lapangan-lapangan baru, meliputi Belanak, Hiu Kerisi, Oseil, Pungut, Jabung, sukowati, Duri Area 11 dan Ripah,
- Pengembangan lapangan baru, meliputi Oyong, Piano/ West Piano, Tanggulangin, KE 30, Yani, Sisi Nubi, Risma, Seturian, Ujung Pangkah, Intan, Vita, Aryani, Sapi, dan TBA/TBC.
- Optimalisasi produksi lapangan lama, meliputi: Balam SE, Kaji Semoga, Kulin, Batang, Handil, Kasikan, dan Sabak
- Mempercepat lapangan marginal, (sudah teridentifikasi sebanyak 31)
- Mempercepat dan mendorong pemboran delineasi pada penemuan eksplorasi yang potensial, seperti Bukit Tua, Jeruk, dan Aster.
- Meningkatkan monitoring dan pengawasan produksi, khususnya pada kinerja KKS yang menurun (9 KKS pada kuartal I/05)

Perkembangan dan prospek produksi (*lifting*) minyak dan gas bumi tahun 2005 dibanding prognosa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM No: 1135.K/81/MEM/2005 tanggal 28 Maret 2005, sebagai berikut:

- Realisasi *lifting* minyak bumi triwulan I tahun 2005 (periode Desember 2004 sampai dengan Februari 2005) adalah sebesar 90.858,48 ribu barel (1.009,54 ribu barel per hari) atau mencapai 22 % dibanding prognosa tahun 2005 sebesar 410.625,00 ribu barel (1.125 ribu barel per hari).
- Realisasi *lifting* gas alam triwulan I tahun 2005 (periode Desember 2004 sampai Februari 2005) adalah sebesar 588.777,84 ribu MMBTU dan 7.820 M Ton atau 24 % dibandingkan prognosa tahun 2005 sebesar 2.411.386,62 ribu MMBTU.
- Angka realisasi *lifting* minyak dan gas bumi triwulan I tahun 2005 masih bersifat sementara karena belum direkonsiliasi dengan para kontraktor KKS dan PT Pertamina (Persero)

²⁴ Bahan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR-RI, Tanggal 12 Mei 2005, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Jalan Medan Merdeka Selatan No: 18, Jakarta Pusat, hal 1 – 2.

3. Ekspor Minyak Mentah Indonesia

Peranan subsektor migas masih penting dan strategis untuk menyumbang penerimaan dalam negeri. Namun, selama sepuluh tahun terakhir, ekspor minyak mentah Indonesia mengalami penurunan rata-rata sebesar 3,8% per tahun. Hal ini disebabkan jumlah minyak mentah untuk diolah di kilang-kilang minyak di dalam negeri mengalami peningkatan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM). Indonesia bahkan juga harus mengimpor minyak mentah dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan kilang dalam negeri, misalnya ALC (*Arabian Light Crude*) dari Arab Saudi, ILC (*Iranian Light Crude*) dari Iran, Australia (Jabiru dan Harriet) dan dari Malaysia (Tapis).

Peningkatan konsumsi BBM di dalam negeri jika tidak diantisipasi dan diperhitungkan dengan cermat dan matang akan membahayakan Indonesia di masa mendatang. Berbagai analis para ahli perminyakan telah memperhitungkan akan adanya sebuah krisis energi di Indonesia. Dalam sepuluh tahun mendatang, Indonesia menjadi negara pengimpor BBM secara neto (*net oil importer*) dan dalam dua puluh tahun bahkan dapat menjadi negara pengimpor minyak secara menyeluruh (*total oil importer*) karena cadangan minyak buminya telah habis sama sekali.

Tanda-tanda kekhawatiran para ahli tersebut telah terjadi akhir-akhir ini menyusul adanya fenomena kelangkaan BBM. Dari sisi penerimaan negara, Indonesia sesungguhnya sudah menjadi *net oil importer*. Penerimaan sektor gas bumi lebih besar dari minyak bumi. Pada tahun 2004 misalnya, produksi minyak Indonesia mengalami penurunan jauh di bawah volume yang ditargetkan dalam APBN 2004. Berdasarkan data pemerintah, produksi minyak mentah per Januari 2004 hanya 981 ribu barel per hari. Padahal target APBN sebesar 1,2 juta barel per hari. Rata-rata produksi minyak tahun ini adalah 1,124 juta barel per hari. Volume itu sudah termasuk produksi kondensat sebesar 143 ribu barel per hari. Itu artinya produksi minyak mentah hanya sebesar 981 ribu barel per hari. Penurunan angka produksi itu disebabkan banyak kilang yang sudah tua sehingga volume yang dihasilkan berkurang secara alamiah. Sementara, kegiatan eksplorasi di beberapa daerah belum berjalan dengan baik.

CERITA NET IMPORTER²⁵

Hingga lima tahun terakhir ini subsektor migas menyumbang penerimaan dalam negeri sebesar rata-rata 33,55% per tahun. Ini menunjukkan betapa penting dan strategisnya sektor migas di dalam mendukung APBN, apalagi saat menghadapi krisis ekonomi dan saat ini sedang dalam proses pemulihan.

Namun, selama sepuluh tahun terakhir, ekspor minyak mentah Indonesia mengalami penurunan walaupun kecil yaitu rata-rata sebesar 3,8% per tahun. Peralnya, jumlah minyak mentah untuk diolah di kilang-kilang minyak dalam negeri mengalami peningkatan guna memenuhi kebutuhan BBM yang juga terus meningkat. Selama ini, minyak mentah Indonesia banyak diekspor ke Jepang, Cina, Amerika Serikat, Korea Selatan, Australia, dan negara-negara lain.

Pada saat yang sama, Indonesia juga harus mengimpor minyak mentah dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan kilang dalam negeri yang dapat memproduksi jenis-jenis hasil kilang tertentu seperti lube base dan aspal, serta untuk meningkatkan hasil BBM. Semula jenis minyak mentah yang diimpor adalah ALC (Arabian Light Crude) dari Arab Saudi, kemudian dalam rangka imbal beli (counter trade) Indonesia juga mengimpor minyak mentah dari Iran (ILC).

Dalam upaya meningkatkan hasil kilang berupa BBM, Indonesia mengimpor minyak mentah dari Australia (Jabiru dan Harriet) dan dari Malaysia (Tapis) yang kecenderungannya meningkat.

Sejauh ini, hasil kilang terutama LSWR dan Naptha diekspor ke Jepang sebagai negara tujuan utama. Sedangkan, untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, beberapa jenis BBM tertentu masih harus diimpor antara lain minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, dan minyak bakar. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan BBM akhir-akhir ini, maka impor BBM juga cenderung meningkat.

Konsumsi BBM kita yang terus meningkat kiranya amat merisaukan. Banyak pihak telah mengingatkan bahwa jika Indonesia tidak bersiap menghadapi krisis energi, maka dalam 10 tahun mendatang akan menjadi *negara pengimpor secara neto (net oil importer)* dan pada 20 tahun lagi menjadi *negara pengimpor minyak secara menyeluruh (total oil importer)*. Karena, cadangan minyak buminya telah habis sama sekali.

Seorang eksekutif dari LSM di bidang lingkungan (Pelangi),

²⁵Minyak yang Kian Terkurus.

<http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0404/20/0109.htm>

Agus P. Sari menyatakan bahwa pada 1988 Indonesia mengeluarkan dana untuk impor minyak sebesar 985 juta dolar AS, sedangkan pemasukan dari ekspornya masih lebih besar, yaitu tiga miliar dolar AS. Namun, dengan kian menipisnya cadangan minyak bumi kita, pada 2010 nanti nilai ekspor minyak akan sama dengan nilai impor. Tahun 2020 diperkirakan Indonesia akan mengimpor minyak senilai 11 miliar dolar AS, dengan asumsi harga minyak ketika itu 25 dolar AS per barel. "Dan, pada tahun itu Indonesia tidak akan lagi mengekspor minyak karena cadangan minyaknya telah habis!" tandasnya.

DIRJEN Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Iin Arifin Takhyan tak mengelak. Dia bahkan sering mengingatkan bahwa saat ini dari sisi penerimaan negara, Indonesia sudah menjadi net oil importer. Selain itu, penerimaan negara dari sektor gas bumi menjadi lebih besar dari minyak bumi.

Direktur Eksplorasi dan Produksi, Ditjen Migas, Novian M. Thaib, mengungkapkan, produksi minyak Indonesia mengalami penurunan jauh di bawah volume yang ditargetkan dalam APBN 2004. Berdasarkan data pemerintah, produksi minyak mentah per Januari 2004 ini hanya 981 ribu barel per hari. Padahal target APBN sebesar 1,2 juta barel per hari. Sedangkan rata-rata produksi minyak tahun ini adalah 1,124 juta barel per hari. Volume itu sudah termasuk produksi kondensat sebesar 143 ribu barel per hari. Itu artinya produksi minyak mentah hanya sebesar 981 ribu barel per hari. Penurunan angka produksi itu disebabkan banyak sumur yang sudah tua sehingga volume yang dihasilkan berkurang secara alamiah. Sementara, kegiatan eksplorasi di beberapa daerah belum berjalan dengan baik.

Penurunan angka produksi minyak mentah itu juga diakui Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas). Tahun 2003 tercatat rata-rata produksi minyak mencapai 1,149 juta barel per hari. Sedangkan tahun 2002 produksi bisa sampai 1,2 juta barel per hari. Oleh karena itu, menurut Kepala BP Migas, Rachmat Sudibyo, guna mencegah kita menjadi negara net importir minyak yang diprediksi terjadi pada 10 tahun mendatang, maka perlu dilakukan eksplorasi secara intensif dan masyarakat mulai mengubah kebiasaannya mengkonsumsi minyak dan gas.

Saat ini, katanya, negara membutuhkan penemuan minyak baru sekira 400 juta hingga 500 juta barel per tahun. Menurut data BP Migas, Indonesia pada akhir 2003 memiliki cadangan potensial sekira 9,75 miliar barel yang diperkirakan cukup untuk produksi selama 20 tahun.

Mengurangi konsumsi minyak, sungguh suatu hal yang penting seiring dengan peranan Indonesia selama ini sebagai negara penghasil minyak. Bahkan, Presiden OPEC (Organisasi Negara-negara Pengekspor

Minyak) dipegang putera Indonesia, yaitu Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. Namun, itu bukan suatu yang gampang. Mengingat sebanyak 70 persen dari produksi minyak saat ini digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti transportasi, listrik, industri, dan peralatan rumah tangga yang pada 2003 mencapai 54,7 juta kilo liter.

Yang agak melegakan, Presiden Megawati Soekarnoputri saat menghadiri pertemuan para stakeholder bidang minyak dan gas di Istana Bogor, Januari 2004 lalu, mencanangkan cadangan minyak baru Indonesia sebesar 1 miliar barel. Menurut Kepala Negara, sebanyak 70 persen dari 1 miliar cadangan minyak itu merupakan hasil penemuan Pertamina, antara lain di Pondok Tengah, Bekasi, sebesar 233 juta barel (berupa own operation). Selebihnya merupakan penemuan hasil kerja sama dengan mitra kerja Pertamina.

Pertamina juga membukukan produksi minyak kurang lebih 467 juta barel tahun lalu, hasil kerja sama dengan beberapa perusahaan migas asing, antara lain ExxonMobil di Blok Cepu, Jawa Tengah, Akar Golindo di Lapangan Tuba Obi Timur dan Tuba Ubi Timur, dengan Exspann Senoro Toili di Lapangan Tiaka, TotalFinaElf di Lapangan Sisi atau Nubi, dan kerja sama dengan Petro China di Lapangan Sukowati, Tuban, Jawa Timur.

Pengembangan usaha hulu Pertamina juga mulai melakukan aktivitas di luar negeri, dengan ditandatanganinya kontrak kerja sama antara Pertamina Hulu, Petronas, Carigali, dan PetroVietnam, untuk mengelola Blok SK-305 di Malaysia. Di Vietnam, Pertamina membentuk kerja sama joint operating company dengan PIDC dari Vietnam dan Petronas Malaysia untuk mengelola Blok-10 dan 11-1 di Vietnam.

Selain itu, saat ini sedang dilakukan evaluasi pengeboran sumur eksplorasi Gau Ong-IX (offshore Vietnam). Pertamina juga berekspansi ke Irak dengan mengelola Blok-3 Western Dessert yang kini telah memasuki tahap implementasi kontrak dan persiapan pelaksanaan survei seismik 2D sepanjang 2.200 kilometer.

E. Penentuan Harga BBM

Penentuan harga minyak dalam negeri yang ditentukan bersama antara Pemerintah dan DPR dalam APBN, ditentukan dengan beberapa pertimbangan, antara lain: ²⁶

- Kenaikan harga minyak mentah dunia yang dapat mendorong besaran kenaikan subsidi BBM.
- Kenaikan harga minyak mentah tersebut juga dapat menaikkan pendapatan untuk APBN.

Dalam penentuan harga minyak dan asumsi-asumsinya, pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan ditentukan bersama-sama dengan departemen lain dalam suatu Tim Asumsi yang beranggotakan beberapa departemen termasuk Menko Perekonomian, Departemen ESDM khususnya berkaitan dengan harga minyak dan produksi minyak, BPS dan Bank Indonesia.²⁷

Untuk asumsi ekonomi makro dengan penentuan APBN, Menkeu menjadi salah satu anggota tim tersebut dan bukan sebagai penentu utama.

Untuk APBNP, pemerintah telah mengajukan kepada DPR dengan besaran US \$ 35 per barel, namun tetap terbuka kemungkinan untuk membahas perkembangannya dengan DPR setelah pengajuan APBN-P tersebut

Berdasarkan Catatan Rapat Kerja Komisi VII DPR-RI dengan Menteri ESDM, Meneg BUMN, Kepala BP Migas, Kepala BPH Migas, dan Dirut Pertamina pada Senin, 16 Mei 2005, maka raker menutup rapat dengan menyampaikan beberapa hal penting sebagai berikut:²⁸ Dalam rangka *law enforcement* maka akan mengundang Polri. Selain itu, raker juga menyimpulkan bahwa:

- a. Patokan harga minyak adalah US \$ 40 – 45 per barel.
- b. Produksi minyak 1,125 juta barel per hari
- c. Alokasi BBM tidak ada perubahan, dengan catatan distribusi dan pengawasan betul-betul diperbaiki.

²⁶ Catatan Rapat Kerja Komisi VII DPR-RI dengan Menteri ESDM, Meneg BUMN, Kepala BP Migas, Kepala BPH Migas, dan Dirut Pertamina pada Senin, 12 Mei 2005, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Kesimpulan raker ini selanjutnya dibuat surat rekomendasi dari Komisi VII DPR RI untuk dibawa ke panitia anggaran untuk selanjutnya dibahas oleh Panitia Anggaran.

1. Harga Minyak Mentah Dunia yang Fluktuatif

Menteri ESDM soal mekanisme harga dari Catatan Rapat Raker Komisi VII DPR-RI dengan Menteri ESDM, Meneg BUMN, Kepala BP Migas, Kepala BPH Migas, dan Dirut Pertamina pada Senin, 12 Mei 2005, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ia mengatakan sejumlah hal, antara lain:

Perkembangan harga minyak bumi dunia dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya keadaan persediaan minyak mentah atau BBM di Amerika Serikat dan keadaan sosio-politik di negara-negara Timur Tengah.²⁹

Selain itu, beberapa faktor lainnya antara lain:³⁰

- Pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya China dan India) yang berdampak pada peningkatan permintaan minyak mentah masih tetap tinggi
- Situasi politik di negara-negara penghasil minyak, khususnya di Timur Tengah sebagai produsen terbesar, yang kurang kondusif.
- Kondisi geopolitik dunia juga memperbesar kecemasan pasar, antara lain berupa ketegangan hubungan Kondisi di Iran dan Irak, ketegangan hubungan AS – Iran, ketegangan hubungan AS – Masyarakat Ekonomi Eropa (EU) - Rusia – Cina terhadap Iran, ketegangan hubungan AS – Venezuela, Kondisi Meksiko menjelang Pemilu 2006, industri perminyakan di Nigeria menghadapi masalah dengan para pekerja, adanya pemilu di Gabon dan Sudan pada 2005 serta adanya ketegangan antara Cina-Taiwan.³¹

²⁹ Catatan Rapat Raker Komisi VII DPR-RI dengan Menteri ESDM, Meneg BUMN, Kepala BP Migas, Kepala BPH Migas, dan Dirut Pertamina pada Senin, 12 Mei 2005, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

³⁰ Materi Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR – RI, 12 Mei 2005, PT Pertamina (Persero)

³¹ Maezar Rahman, Dr. Ir, 2005, Asumsi Harga Minyak Internasional. Analisis Faktor-faktor di Belakang Tingginya Harga Minyak, Bahan Presentasi Gubernur OPEC pada Raker dengan Komisi VII DPR-RI Mengenai Harga Minyak Internasional, 25 Agustus 2005.

- Strategi kuota OPEC yang ditetapkan secara berkala. Negara-negara OPEC telah meningkatkan produksi lebih dari 4 MB/D selama 2002 – 2005.³²
- Tingkat produksi minyak mentah dunia OPEC dan Non Opec. Dimana tingkat pertumbuhan produksi negara-negara non OPEC cenderung mengecil.³³
- Tingkat stok minyak mentah dunia. Sejak 2004, kelebihan supply negara-negara OPEC masuk ke stok dunia sehingga jumlah stok minyak mentah di AS dan negara-negara industri maju (OECD) jauh di atas kondisi biasa.³⁴
- Aksi spekulasi pasar.

2. Penentuan Besaran Subsidi BBM

Kenaikan penerimaan dari ekspor minyak mentah saat ini masih kalah rendah dibandingkan dengan biaya untuk subsidi BBM. Akibat kenaikan harga minyak mentah (*crude oil*), biaya pengadaan BBM pun menjadi meningkat. Jumlah dana untuk subsidi pun bertambah sehingga tidak tertutup kemungkinan dapat membuat APBN menjadi defisit. *Cash flow* Pertamina juga diuji stabilitasnya karena untuk mengimpor minyak mentah dengan harga yang relatif mahal tersebut, Pertamina harus membiayai dari kas perusahaan. Sedangkan penggantian dana talangan subsidi dari Pemerintah memerlukan sejumlah prosedur administrasi yang telah disepakati sebelumnya sehingga memerlukan waktu tenggang tertentu.

Untuk mengatasi kelangkaan BBM pada pertengahan 2005, Pertamina mendesak pemerintah agar segera mencairkan dana subsidi sehingga Pertamina dapat membeli minyak mentah atau BBM untuk dapat menambah pasokan untuk memenuhi keperluan dalam negeri. Mendesaknya pengucuran dana subsidi tersebut berhubungan dengan rencana Pertamina yang masih harus menyelesaikan tiga buah *Letter of Credit* (LC) pembelian minyak dan BBM yang tertunda.

Pertamina mengaku perlu mendapatkan tambahan dana untuk menaikkan stok BBM karena adanya kelebihan kuota yang terjadi akibat pada kuartal pertama 2005. Kebutuhan BBM tahun 2005 memang diperkirakan melebihi kuota yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 59,4 juta kiloliter (KL). Penyebabnya, konsumsi solar dan premium

³² *Ibid.*

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid.*

meningkat tajam akibat tumbuhnya industri dan bertambahnya kendaraan bermotor. Konsumsi premium bulan Maret 2005 sebesar 43,6 ribu KL per hari naik menjadi 44,3 ribu KL per hari pada April. Pada Mei, konsumsi premium naik 5% menjadi 45,8 ribu KL. Pemakaian Solar juga mengalami peningkatan yang tajam, dari rata-rata 64,9 ribu KL per hari pada Januari menjadi 70,4 ribu KL per hari pada Mei 2005 atau naik 8%.

Tren adanya kenaikan konsumsi BBM di dalam negeri tersebut tidak diantisipasi dengan benar dan tepat. Bahkan ada kesan, tren seperti itu diabaikan oleh pejabat pemerintah yang menyusun anggaran, dan juga anggota DPR, yang mengesahkan anggaran. Alasannya adalah untuk meringankan beban subsidi BBM yang harus ditanggung oleh anggaran. Hal ini disebabkan karena lebih dari separuh harga jual BBM di dalam negeri ditanggung oleh pemerintah. Jika penggunaan BBM tidak dibatasi – biasa disebut kuota – pemerintah tentu tidak dapat memperkecil subsidi. Adapun angka konsumsi BBM yang disepakati sepanjang 2005, dikurangi lima persen menjadi 59,6 juta kiloliter.

Sayangnya, selama lima bulan pertama tahun 2005, asumsi anggaran terbukti meleset, khususnya untuk premium dan minyak tanah. Bensin yang telah tersedot oleh konsumsi mobil mencapai 7,96 juta kiloliter atau lebih dari separuh jatah anggaran. Total BBM yang telah dikonsumsi hingga akhir Mei mencapai 25,36 juta kiloliter atau 43 persen.

Untuk memenuhi permintaan yang telah melampaui kuota, Pertamina tidak dapat seenaknya belanja. Ongkos BBM relatif sangat besar dibandingkan dengan kemampuan kondisi keuangan yang dimiliki Pertamina saat ini. Delapan puluh persen pendapatan Pertamina saat ini datang dari bisnis pengadaan dan distribusi BBM di dalam negeri. Pada saat harga minyak mentah dan BBM terus naik, keuangan Pertamina semakin terbatas.

Untuk memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri, Pertamina mengimpor minyak mentah, yang kemudian diolah di kilang dalam negeri menjadi produk jadi BBM, seperti bensin. Volume minyak mentah yang dapat diolah di kilang di dalam negeri mencapai satu juta barel per hari. Sisa kebutuhan produk BBM ditutup dengan impor yang besarnya 350 ribu barel per hari.

Sebagai ilustrasi, jika harga minyak mentah pada kisaran US\$ 55, harga produk minyak sepuluh dolar lebih tinggi. Itu artinya Pertamina memerlukan dana setiap bulan sekitar US\$ 2,3 miliar. Pertamina harus membelanjakan dana sebesar biaya tersebut pada bulan pertama, dana tersebut kemudian diganti oleh pemerintah pada akhir bulan pertama untuk modal belanja Pertamina bulan kedua.

Masalah terjadi jika pada bulan kedua harga minyak mentah dan BBM ternyata naik. Andaikan saja harga minyak mentah naik menjadi US\$ 57, harga produk BBM menjadi US\$ 67. Maka, ada kekurangan

US\$ 100 juta yang harus ditomboki oleh Pertamina. Kesulitan Pertamina dalam mengimpor minyak semakin berat karena berdasarkan Undang-undang Migas baru, posisi Pertamina tak lagi membawahkan kontraktor produksi bagi hasil (KPS). Dengan demikian, Pertamina kehilangan hak mengutip uang retensi pemasaran dari KPS yang beroperasi di Indonesia. Padahal nilai pungutan dana retensi tersebut cukup besar, yaitu mencapai Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun per tahun. Kutipan retensi inilah yang menjadi sumber dana ketika Pertamina dihadapkan pada situasi kenaikan harga BBM seperti akhir-akhir ini. Setelah tak ada retensi, Pertamina mengandalkan pinjaman dari bank untuk membayar kekurangan penggantian pemerintah.

Untuk memenuhi permintaan yang telah melampaui kuota, Pertamina tak bisa seenaknya belanja. Ongkos membeli BBM luar biasa besarnya untuk kantong Pertamina yang sekarang ekstra tipis. Delapan puluh persen pendapatan Pertamina saat ini datang dari bisnis pengadaan dan distribusi BBM di dalam negeri. "Marginnya cuma 8 per mil," ujar Martiono. Pada saat harga terus menanjak, uang di kantong Pertamina yang tandas.

Martiono memberikan contoh sederhana bagaimana Pertamina terengah-engah mengikuti kenaikan harga minyak di pasar dunia. Untuk memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri, Pertamina mengimpor minyak mentah, yang kemudian diolah di kilang dalam negeri dan produk jadi BBM, seperti bensin. Volume minyak mentah yang dapat diolah di kilang dalam negeri mencapai satu juta barel per hari. Sisa kebutuhan produk BBM ditutup dengan impor yang besarnya 350 ribu barel per hari.

Jika harga minyak mentah di kisaran US\$ 55, harga produk minyak sepuluh dolar lebih tinggi. Itu artinya kebutuhan duit Pertamina setiap bulannya saja sekitar US\$ 2,3 miliar. Andaikan saja itu belanja yang terjadi pada bulan pertama. Jumlah itu kemudian diganti oleh pemerintah pada akhir bulan pertama untuk modal belanja Pertamina bulan kedua.

Yang membuat pusing kepala para petinggi Pertamina adalah bila pada bulan kedua harga ternyata naik. Andaikan saja harga minyak mentah naik menjadi US\$ 57, harga produk BBM menjadi US\$ 67. Maka, ada kekurangan US\$ 100 juta yang harus ditomboki oleh Pertamina.³⁵

³⁵ Tercekik Anggaran Minyak. TEMPO INTERAKTIF. Edisi. 20/XXXIV/11 - 17 Juli 2005

Namun sejauh mana pemerintah kuat membiayai subsidi? Sampai kini tak ada yang bisa menebak ke mana harga minyak internasional akan bergerak. "Yang pernah saya baca saja ada 30 ramalan yang berbeda," ujar Martiono. Pekan lalu, harga minyak jenis *light sweet* malah kembali menggila dan dua kali melampaui US\$ 60 per barel. Badai di Teluk Meksiko, yang diperkirakan mengganggu produksi minyak di wilayah tersebut, menjadi penyebab utama.

Peluang harga kontrak minyak kembali melayang sangat besar, menjelang musim dingin di bumi belahan utara. Kurtubi memperkirakan kelebihan permintaan hingga akhir tahun masih sebesar 4 juta barel.

Jika harga internasional semakin tinggi, otomatis beban subsidi anggaran ikut melembung. Mulia mengaku subsidi yang telah terpakai sebesar Rp 42 triliun atau sekitar 55 persen dari total yang dianggarkan. Sulit membayangkan sisa anggaran itu cukup untuk sampai akhir tahun. Jika harga rata-rata minyak mentah US\$ 60 per barel, Menteri Energi Purnomo Yusgiantoro menghitung subsidi meledak hingga Rp 138 triliun.

Itu dengan catatan konsumsi minyak tak bergeser dari anggaran semula. Namun, melihat borosnya orang Indonesia menggunakan BBM sepanjang tahun ini, sangat mungkin volume BBM yang terpakai meningkat. Pertamina pun sudah meminta DPR agar menambah kuota konsumsi BBM tahun ini. "Kita minta ditambah atau disamakan saja dengan kuota 2003 (untuk minyak tanah)," kata Wakil Direktur Utama Pertamina, Mustiko Saleh.

Dalam hitungan pemerintah, kenaikan harga yang dibarengi dengan kenaikan volume sebesar 10 persen dari tahun lalu akan melipatgandakan subsidi BBM hingga Rp 150 triliun. Dalam skenario ini, defisit anggaran menganga hingga Rp 38 triliun. "Ini berarti Indonesia menjadi negara sosialis terbesar di dunia," ujar Kalla

Dalam jangka panjang, banyak langkah yang bisa diambil pemerintah untuk memberantas kelangkaan minyak. Menggenjot produksi minyak di dalam negeri adalah yang terutama. Ini bukan tugas yang sepele, mengingat sejak 1999 investasi di sektor eksploitasi melemah. "Ini pentingnya kita mencapai kesepakatan di Cepu kemarin," ujar Martiono. Seandainya kerja sama dengan ExxonMobil mulus, secepatnya dalam dua tahun mendatang Indonesia bisa mendapat tambahan produksi minyak paling tidak 150 ribu barel per hari.

Dalam jangka pendek, tak ada obat yang enak untuk mengatasi kelangkaan. Presiden, sejak dua pekan lalu, memang mengimbau para pejabat untuk memotori gerakan penghematan BBM. Pekan lalu, imbauan penghematan juga diembuskan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Tapi langkah itu seperti tak disambut dengan hangat. Pada pekan pertama instruksi itu keluar, nyaris tak ada perubahan yang terlihat di kantor-kantor pemerintah (baca Tempo, 4 Juli 2005).

Andai penghematan tak mempan menahan nafsu menenggak BBM, besar kemungkinan pemerintah akan mengambil langkah yang lebih keras, yaitu menaikkan harga. Intro kebijakan itu sudah terdengar pekan lalu. Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Iin Arifin Takhyan, menyatakan pemerintah akan merombak harga jual BBM untuk industri pertambangan, minyak, dan gas. Industri itu diharuskan membayar harga BBM sama dengan harga internasional. "Ini akan diberlakukan dalam waktu dekat," kata Iin. Ini jelas kebijakan yang tak akan mudah diterima rakyat.³⁶

Menghadapi kenyataan yang ada, kiranya tidak ada jalan lain bahwa pemerintah harus tetap mengedepankan aspek-aspek yang menguntungkan bagi bangsa dan negara secara jangka panjang. Pemegang kekuasaan boleh saja berganti, namun komitmen terhadap penyelamatan sumber daya energi termasuk yang harus menjadi prioritas³⁷

Salah satunya adalah bagaimana menyikapi kebijakan pemberian subsidi BBM yang selama ini dilaksanakan. Di satu sisi, ternyata kebijakan ini tidak tepat sasaran, bahkan menimbulkan berbagai penyimpangan baik dalam penggunaan, juga terhadap suatu sistem perekonomian yang sehat. Pada tahun ini saja, pemerintah dan Panitia Anggaran DPR memutuskan bahwa subsidi BBM untuk APBN 2004 sebesar Rp 14,5 triliun.

Peningkatan subsidi itu disebabkan kenaikan harga minyak di pasar dunia yang menambah pemasukan bagi pemerintah. Semula dalam nota keuangan, asumsi harga minyak sebesar 21 dolar AS per barel, sedangkan dalam pembahasan dengan Panitia Anggaran berubah menjadi 22 dolar AS per barel. Selain itu, kenaikan subsidi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti prediksi tentang pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk.

Dirjen Lembaga Keuangan Darmin Nasution memperhitungkan bahwa kenaikan harga minyak dunia saat ini mencapai 38 dolar AS per barel, belum menimbulkan rezeki nomplok (windfall profit) bagi anggaran, sehingga tidak ada rencana revisi asumsi APBN yang saat ini

³⁶ Tercekik Anggaran Minyak. TEMPO INTERAKTIF. Edisi. 20/XXXIV/11 - 17 Juli 2005.

³⁷ Minyak yang Kian Terkurus. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0404/20/0109.htm>

ditetapkan 22 dolar AS per barel. Justru ada kecenderungan kalau harga minyak dunia naik malah pemerintah harus membayar subsidi yang bertambah. "Sebenarnya kami tidak terlalu menerima dampak dengan kenaikan harga minyak dunia, penerimaan kami segitu-gitunya," ujarnya.

Menurut pengamat perminyakan, Dr. Kurtubi, sebenarnya subsidi BBM yang sangat besar ini tidaklah perlu dipermasalahkan kalau jumlah tersebut diterima kelompok masyarakat ekonomi lemah yang memang wajar untuk mendapatkan subsidi dari negara.

Karena pemberian subsidi tersebut melekat dengan fisik/volume BBM, maka siapa pun yang mengonsumsi BBM tersebut secara langsung telah menikmati subsidi termasuk kelompok masyarakat menengah ke atas, industri dan pemodal besar serta PMA/investor asing. Padahal, subsidi tersebut ditanggung APBN yang berarti juga ditanggung seluruh rakyat termasuk masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan yang bekangan ini jumlahnya semakin membengkak.

Menurutnya, harga BBM yang tidak wajar merupakan salah satu sumber ketidakefisienan ekonomi nasional. Itu terjadi dalam bentuk keputusan investasi yang salah, alokasi sumber daya alam dan modal yang salah, penyebab penyelundupan dan pengoplosan, subsidi yang salah sasaran, pemakaian BBM yang boros, tidak berkembangnya sumber daya energi nonminyak (gas, BBG, panas bumi, batu bara, briket) dan sebagainya.

Laju kenaikan konsumsi BBM yang tinggi dengan tingkat harga yang sangat rendah secara pasti akan mempercepat bangsa ini untuk tergantung sepenuhnya pada BBM impor yang akan sangat menguras devisa. Itu suatu hal yang sangat rawan bagi kepentingan ekonomi dan keamanan bangsa

Kurtubi menyatakan, Indonesia sebagai negeri kepulauan dengan penduduk lebih 200 juta orang ini hanya memiliki cadangan terbukti (proven reserves) sekira lima miliar barel minyak. Kemampuan produksi minyak mentah sekira 1,5 juta barel per hari, berarti akan habis sekira sembilan tahun lagi, apabila tidak ada penemuan yang signifikan. Oleh karena itu, Indonesia seyogyanya mempunyai acuan kebijaksanaan energi yang jelas, rasional, dan berwawasan jauh ke depan (energy sustainable based policy), tidak bersifat ad-hoc.

Selain itu, sudah waktunya masyarakat diinformasikan secara transparan dan benar mengenai keadaan potensi energi dan BBM yang kita miliki. Bahwa, kondisi sumber daya minyak kita tidak akan mampu mendukung harga BBM yang sangat tidak wajar sekarang ini untuk jangka panjang.

Kalau kita sudah bersepakat untuk melindungi kelompok masyarakat yang memang masih perlu dibantu dengan memberikan subsidi langsung, sudah sewajarnya kelompok masyarakat yang memang tidak perlu disubsidi dapat memahaminya bahwa tidak mungkin pemerintah akan memberikan subsidi secara terus-menerus.³⁸

F. Penyimpangan Praktik Penyaluran BBM

1. Latar belakang

Krisis BBM yang ditandai dengan adanya kelangkaan BBM di masyarakat pada pertengahan 2005 tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang tetap ingin mempertahankan konsumsi BBM sesuai kuota sebesar 59,6 juta kilo liter. Alasannya jelas, jika konsumsi BBM melebihi kuota tersebut, maka Pertamina lah yang harus nombok. Tetapi, jika pemerintah tidak ingin Pertamina menobok, maka pemerintah harus bersedia merevisi kuota sekaligus menambah biaya subsidi BBM yang jumlahnya sangat besar.

Di sisi lain, ada kenyataan yang tidak terbantahkan, bahwa di tengah masyarakat ditemukan praktik- praktik penyimpangan berkaitan dengan penyaluran BBM ini. Praktik-praktik penyimpangan tersebut berkaitan dengan persoalan pengoplosan, penimbunan, penjualan BBM kepada pihak yang seharusnya tidak menikmati harga subsidi, sampai persoalan penyelundupan BBM ke luar negeri.

Tidak heran, jika pemerintah - yang tampak dari pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di depan media, mengharap agar Pertamina kembali pada Perpres 22 tahun 2005 tentang kenaikan BBM yang mengatur harga BBM untuk jenis tertentu dan konsumen tertentu. Dengan demikian, ia berharap tidak ada pihak-pihak yang berhak menikmati subsidi harga BBM justru mendapatkan keuntungan dari sejumlah praktik kejahatan di bidang BBM tersebut.

Latar belakang

- Disparitas harga BBM dalam negeri dengan luar negeri yang cukup besar serta perbedaan harga antara minyak tanah dengan BBM lain (premium dan minyak solar) membuka peluang terjadinya penyalahgunaan BBM.

³⁸Minyak yang Kian Terkurus. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0404/20/0109.htm>

Masalah perbedaan harga antara harga yang ditetapkan pemerintah di dalam negeri dengan harga BBM di luar negeri menjadi masalah krusial yang memungkinkan praktik-praktik peyelundupan BBM ke luar negeri. Selain itu, disparitas harga juga terjadi di dalam negeri yaitu adanya perbedaan harga yang ditetapkan pemerintah untuk masyarakat umum dan sektor industri. Tidak heran, selama proses penyaluran BBM terdapat titik-titik rawan yang memungkinkan adanya kebocoran-kebocoran akibat praktik penimbunan, pengoplosan, penjualan BBM kepada pihak yang tidak berhak mendapatkan subsidi, dan proses penyelundupan BBM ke luar negeri.

- Perubahan perundang-undangan tentang minyak dan gas bumi dari UU No. 8/ 1971 menjadi UU No. 22/2001, pengawasan operasional pendistribusian BBM yang sebelumnya dilakukan Pertamina sekarang dilakukan oleh Pemerintah.
- Masih lemahnya pengawasan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi dan penegakkan atau sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan BBM karena antara lain tidak jelasnya tugas dan wewenang serta peran masing-masing instansi yang ditugaskan untuk pengawasan yang mengakibatkan keuangan negara bocor.³⁹

Masalah kebocoran di PT Pertamina (Persero) telah diangkat dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Direktur Utama Pertamina untuk Masa Persidangan II tahun Sidang 2004 – 2005. Berikut adalah sebagian dari jawaban Direktur Utama PT Pertamina (Persero) atas pertanyaan lisan anggota Komisi VII.

Berkaitan dengan penanganan kasus KKN internal di tubuh PT Pertamina (Persero).⁴⁰

Bila ada indikasi KKN SPI (Satuan Pengawas Internal) Pertamina akan melakukan audit investigasi dan jika hasil audit investigasi patut

³⁹ Materi Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan BPH Migas, 2005, Sistem Pengawasan dalam rangka Distribusi BBM Bersubsidi, 24 Agustus 2005, hal: 1-2.

⁴⁰ Jawaban Susulan PT Pertamina (Persero) Atas Pertanyaan Lisan Komisi VII DPR RI (Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, Riset dan Teknologi, an Lingkungan Hidup) dalam Rapat Dengar Pendapat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dengan Komisi VII DPR RI. Persidangan II tahun Sidang 2004 – 2005. Tanggal 7 Desember 2004, hal 1.

diduga telah terjadi KKN, Pertamina akan melaporkan ke polisi atau kejaksaan.

Dari 23 kasus yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung per 13 September 2001, 9 kasus telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, namun hingga saat ini, kami tidak dapat memantau perkembangannya lebih lanjut.

2. Potensi Kebocoran

a. Pola penyaluran minyak tanah⁴¹

Dari Depot Pertamina (harga ex-pertamina Rp 700,00 per liter), minyak tanah disalurkan melalui dua cara dengan dua harga berbeda. Pertama disalurkan Pertamina langsung ke industri dengan harga yang masih disubsidi sebesar Rp. 2.200/ liter.

Kedua, dengan harga yang disubsidi pemerintah, minyak tanah dijual ke masyarakat sebagai konsumen akhir dengan jalur mekanisme distribusi sebagai berikut. Dari Depot Pertamina, minyak tanah diangkut dengan mobil tanki agen minyak tanah. Jumlah mobil tanki sebanyak 5.850 buah dan jumlah agen 2.837 buah. Dari agen, selanjutnya didistribusikan ke pangkalan ang jumlahnya mencapai 51.580 buah. Di tingkat pangkalan, misalnya di DKI, harga eceran tertinggi (HET) mencapai Rp 885 per liter. Dari pangkalan, minyak tanah didistribusikan ke konsumen akhir atau masyarakat melalui warung, gerobak dong dan sebagainya. Harga di tingkat konsumen akhir mencapai sekitar Rp 1000 – Rp 1200 per liter, untuk wilayah Jakarta.

Berdasarkan pola distribusi diatas, maka potensi kebocoran adalah sebagai berikut.

- Dari tingkat agen, minyak tanah dapat saja tidak sampai ke pangkalan, tetapi langsung diselewengkan dan dijual ke industri, dijual ke penimbun dan pengoplos.
- Dari tingkat pangkalan, minyak tanah dapat saja tidak sampai ke warung atau penjual eceran sehingga terjadi kelangkaan di masyarakat, tetapi langsung diselewengkan dan dijual ke industri, dijual ke penimbun dan pengoplos, ke sektor informal dan motor tempel.
- Dari tingkat pedagang eceran tidak dijual ke konsumen langsung sehingga terjadi kelangkaan di masyarakat,

⁴¹ Materi Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan BPH Migas, 2005, Sistem Pengawasan dalam rangka Distribusi BBM Bersubsidi, 24 Agustus 2005, hal: 2.

tetapi langsung diselewengkan dan dijual ke ke penimbun dan pengoplos

b. Pola penyaluran premium⁴²

Dari Instalasi atau Depot Pertamina, BBM diangkut trasporter atau kontraktor angkutan ke SPBU sebelum dijual ke kendaraan bermotor. Potensi penyimpangan adalah dilakukan oleh trasporter dan SPBU yang menjual BBM ke penimbun dan pengoplos. Selain itu ada jatah BBM yang dijual kepada pangkalan MT/ Koperasi dan Yayasan tertentu yang dijual ke sektor lain dengan harga di luar subsidi.

c. Pola penyaluran BBM solar⁴³

Dari Instalasi atau Depot Pertamina minyak solar disalurkan ke SPBU dengan menggunakan kontraktor angkutan atau trasporter. Selain itu ada trasnporter pertamina yang langsung menyalurkan solar ke industri dengan harga non-subsidi. Potensi kebocoran terjadi trasporter yang tidak mengirimkan ke SPBU tetapi menjual ke penimbun dan pengoplos yang selanjutnya dapat dijual ke sektor industri atau diselundupkan ke luar negeri melalui kapal tongkang ilegal. Penimbun /pengoplos mengirim solar ilegal ini dengan menggunakan transportir ilegal. Kemungkinan penyimpangan lain dilakukan oleh penjualan solar dari hasil jatah pangkalan MT/Koperasi dan Yayasan tertentu.

d. Pola penyaluran BBM solar Bunker⁴⁴

Selain di darat melalui SPBU, minyak solar juga dijual di lepas pantai atau melalui bunker service untuk melayani kebutuhan BBM kapal-kapal laut baik asing atau domestik.

Untuk menyalurkan solar ke kapal-kapal di lepas pantai, dari Instalasi atau Depot Pertamina, solar disalurkan melalui lima cara, yaitu:

⁴² Materi Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan BPH Migas, 2005, Sistem Pengawasan dalam rangka Distribusi BBM Bersubsidi, 24 Agustus 2005, hal: 3.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

1. Disalurkan ke dermaga bunker PIT untuk melayani kapal domestik dan asing.
2. Disalurkan ke bunker service untuk melayani kapal domestik, kapal TNI/Polri.
3. Disalurkan ke agen bunker (Valas) untuk melayani kapal domestik untuk tujuan luar negeri atau kapal berbendera asing.
4. Disalurkan ke SPBB untuk melayani kapal domestik dengan volume muatan kurang dari 500 DWT.
5. Disalurkan ke SPBN/SPDN untuk melayani kapal nelayan dengan kapasitas 30 GT atau kurang dari 90 PK.

Potensi penyimpangan terjadi jika BBM yang telah dibeli kapal domestik/ kapal asing, kapal domestik kurang dari 500 DWT maupun kapal nelayan kurang dari 90 PK dijual ke penimbun dan pengoplos BBM. Penimbun dan pengoplos ini juga dapat mendapatkan BBM dari sumber lain di darat yaitu dari pihak-pihak yang ditugaskan untuk menyalurkan BBM ke industri dan sumber lainnya. Melalui kapal tanker ilegal, penimbun dan pengoplos ini selanjutnya menjual BBM ke kapal domestik tujuan ke luar negeri atau kapal berbendera asing dengan harga lebih tinggi.

3. Penyelundupan

BBM adalah salah satu komoditas yang rawan diselundupkan ke luar negeri. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan harga di Indonesia dengan di luar negeri. Kondisi ini merangsang pelaku penyelundupan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dari praktik ini. Sebagai contoh, ketika pemerintah Indonesia menetapkan harga solar senilai Rp 2.200 per liter, pemerintah Malaysia menaikkan harga solar jauh lebih mahal, yaitu mencapai Rp 4.300 per liter. Tidak heran jika sejumlah wilayah perbatasan, misalnya Propinsi Kalimantan Barat dengan Malaysia atau Nusa Tenggara Timur dengan Timor Timur, relatif rawan terhadap praktik penyelundupan BBM.

Praktik penyelundupan bahan bakar tidak hanya terjadi di wilayah yang berdekatan dengan wilayah negara lain. Dalam berbagai kesempatan, media juga melaporkan adanya penangkapan upaya pengagagalan penyelundupan BBM seperti di Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sumatra Barat atau Cilacap Jawa Tengah. Pendistribusian solar selama ini dilakukan langsung ke SPBU sesuai dengan jatah dari Pertamina. Masyarakat dapat membeli BBM langsung dari SPBU dan bagi para penyelundup, mereka dapat menjual kembali BBM ini ke luar negeri.

Keuntungan yang diraih melalui praktik penyelundupan relatif cukup menguntungkan. Sebagai contoh adalah keberhasilan aparat keamanan di Surabaya Jawa Timur yang telah mengagalkan lima kontainer penyelundupan BBM ilegal di Timor Leste pada 2004 lalu. Solar yang rencananya akan dikirim ke Timor Leste tersebut tidak dilengkapi dengan surat delivering order yang sah dari Pertamina. Harga solar di Surabaya adalah Rp 3 ribu per liter sedangkan di Timor Leste, harganya mencapai hampir 3 dolar US per liter. Dengan demikian keuntungan penyelundup dari selisih itu mencapai puluhan milyar rupiah, yang berdasarkan kurs waktu itu, ditaksir senilai Rp 21,6 milyar.

Ada analisis bahwa praktik penyelundupan kemungkinan besar juga melibatkan oknum-oknum Pertamina di lapangan yang bekerjasama dengan pemilik SPBU dengan mempermainkan jatah jumlah solar yang diberikan ke SPBU. Secara formal, pejabat di lingkungan Pertamina biasanya membantah keterlibatan aparatnya. Alasannya, jika ada staf Pertamina melakukan secara sembunyi-sembunyi maka akan tetap diketahui pimpinan lebih tinggi karena dari laporan yang diberikan setiap hari akan terbaca ke mana arah pengeluaran BBM dari setiap depot. Sehingga kecil kemungkinan terjadi kekeliruan atau penipuan. Sebaliknya, kerap ada himbauan pejabat Pertamina yang ditujukan ke pemilik SPBU untuk memahami kondisi penjualan di wilayah kerjanya sehingga tidak disalahgunakan.

Untuk menanggulangi persoalan penyelundupan ini, ketegasan aparat penegak hukum perlu semakin diintensifkan selain pengawasan internal yang harus semakin ketat diterapkan di jajaran internal Pertamina. Selain itu, perlu adanya satu sistem yang ketat dan akurat untuk mencegah praktik penyuapan yang biasanya berkaitan dengan penyelundupan ini. Sementara itu, Pertamina harus meningkatkan pengawasan ketat ke setiap jalur distribusi yang ada. Pertamina harus lebih baik melakukan koordinasi dengan pelanggan, rekanan, dan manajemen internal untuk mencegah praktik penyelundupan ini.

Penyelundupan BBM ilegal ke Timor Leste oleh Arief Sumanto dan dua rekannya, diduga tidak dilanjutkan sampai ke Pengadilan. Pasalnya tersangka yang sempat ditahan Dit Polair, kini sudah dibebaskan. Sebagaimana diberitakan Surabaya Sore kemarin dengan judul "Satpol Air Tangkap Penyelundupan Solar di Tanjung Perak", solar yang diselundupkan sebanyak lima container.

Penyelundupan ini diduga melibatkan pejabat Pertamina Surabaya dan Petugas Bea Cukai kantor pelayanan Tanjung Perak Surabaya. Dari kantor Pertamina, diperoleh informasi bahwa keberanian menyelundupkan solar ke bekas provinsi Timor Timur itu, karena ada perbedaan harga.

Pada tahun 2004 sampai dengan awal 2005 di Surabaya, mereka membeli perliter solar Rp 3.000,-sedangkan di Timor Laste, mereka jual perliternya US\$ 3 dengan kurs Rp.9.000,- perdolar sama dengan Rp27.000,-. Jadi ada selisih Rp 24.000,- perliter. Setiap container berisi 18.000 liter solar. Dengan demikian keuntungan penyelundup dari selisih itu mencapai Rp 432.000.000,- percontainer.

Menurut sumber Surabaya Sore di Satpolair, dilepasnya para tersangka tersebut diduga ada tekanan dari pejabat di Jakarta kepada petugas Dit Polair Polda Jatim, sebagaimana diungkapkan Ati, seorang sekretaris CV Bintang Perdana milik Ario Sutedjo.

CV Bintang Perdana yang beralamat di Jalan Ikan Dorang No.1 Surabaya. Ia dikenal sebagai salah satu ekspedisi yang terkait dalam penyelundupan BBM jenis solar ke Timor Leste beberapa waktu lalu. "Semuanya sudah selesai mas, kita tidak ada masalah dan yang menyelesaikan semua itu dari Jakarta" ungkap Ati kemarin (2/12) di kantornya. Ia juga mengaku kalau dalam kasus itu hanya Nur Huda yang menjadi pelakunya.

Menurut sumber Surabaya sore di Pertamina, penyelundupan BBM ke Timor Leste yang sudah berjalan bertahun-tahun ini, dilakukan dengan rapi mulai di Pertamina dan Bea Cukai kantor pelayanan Tanjung Perak Surabaya.

Nur Huda warga Jl.Dukuh Kupang Surabaya yang merupakan pemain BBM oplosan cukup kawasan ini sebagai pemilik BBM illegal tersebut, Yudi warga Dukuh Kupang yang mengatur untuk mengeluarkan BBM dari Pertamina. Sedangkan Arif Sumarto dan Ario Sutejo warga Gubeng Kerta Jaya Barat Timur 7A Surabaya, bertugas untuk melobi Bea dan Cukai Tanjung Perak dan bebrapa instansi terkait di Pelabuhan Tanjung Perak khususnya.⁴⁵

Penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) dari wilayah Kabupaten Sikka ke negara Timor Leste melalui perairan Laut Flores bukan dari Depot Pertamina Maumere, namun dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Maumere.

Kepala Pertamina Depot Maumere, Ketut Sudjono, menjelaskan hal ini kepada wartawan di Maumere, Selasa (21/6). Dirinya ditemui terkait penyelundupan BBM dari Sikka ke Timor Leste yang diduga mendapat dukungan Pertamina setempat. "Kami tidak berurusan dengan penyelundupan. Jika oknum atau kelompok tertentu sengaja menghembuskan isu atau menduga penyelundupan BBM dari Sikka ke

⁴⁵ Penyelundupan Solar Rp 21 Miliar, Dikabarkan Dihentikan Satpol Air. <http://surabayasore.com/lanjut.php?id=490>. 2004-12-04 02:25:00.

Timor Leste didukung orang Pertamina, hal itu tidak benar dan fitnah," katanya.

Ketut mengatakan, manajemen Pertamina sangat profesional dalam mengatur pengeluaran BBM dari depot ke agen solar, minyak tanah dan premium. Pertamina tidak sembarangan mengeluarkan BBM dari depot ke tempat lain. "Jika ada staf Pertamina melakukan secara sembunyi-sembunyi tetap akan diketahui pimpinan lebih tinggi karena dari laporan yang diberikan setiap hari akan terbaca ke mana arah pengeluaran BBM dari setiap depot sehingga kecil kemungkinan terjadi kekeliruan atau penipuan," tegasnya.

Ketut menjelaskan, setiap hari pihaknya mengeluarkan BBM dari depot ke berbagai SPBU berdasarkan permintaan dan laporan agen. Jika terjadi penyelundupan BBM dari Sikka ke luar wilayah itu, diakuinya, dipastikan BBM diambil dari SPBU yang diisi pada jerigen minyak dengan ukuran minimal 20 liter. Menghadang kegiatan penyelundupan BBM melalui SPBU yang mungkin dilakukan nelayan atau pemilik perahu motor, Pemkab Sikka semakin selektif memberikan rekomendasi kepada nelayan dan penyalur BBM khususnya solar.

Langkah yang diambil Pemkab Sikka, menurut dia, sangat tepat agar masyarakat tidak menyalahgunakan BBM untuk tujuan lain seperti menyelundupkannya ke negara tetangga dan sebagainya. Selain itu, lanjut Ketut Sudjono, Pertamina Depot Maumere akan kerja sama dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Maumere memantau penggunaan BBM oleh nelayan.⁴⁶

Tim Kepolisian Daerah Jawa Tengah hari Sabtu (25/6) menggagalkan upaya penyelundupan 528 ton solar yang menggunakan kapal tanker Taiwan berbendera Indonesia di Pelabuhan Samudra Tanjung Intan, Cilacap. Upaya penyelundupan ini menjadi ironis karena terjadi di tengah langkanya bahan bakar minyak dan buruknya distribusi serta disparitas harga komoditas vital itu di beberapa provinsi.

Terkait dengan kasus ini, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah (Jateng) telah memeriksa 18 orang. Dari pemeriksaan itu, sembilan orang dinyatakan sebagai tersangka, enam di antaranya warga negara Taiwan. Mereka adalah Chie Cen, Chie Cuk Fung, Wang Lien Fe, Wang Thian Liang, Lie En, dan Zhang Ning Feng.

Tiga tersangka lainnya, yakni Opung, Tety, dan Neno, hingga kemarin belum tertangkap. Opung dan Tety adalah pemilik PT Teddy

⁴⁶Penyelundupan BBM ke Timor Leste diambil dari SPBU Maumere. <http://www.indonesia.com/poskup/2005/06/23/edisi23/2306flo1.htm>.

Jaya Putra (TJP), agen bahan bakar minyak (BBM) asal Bandung, Jawa Barat.

Dari penangkapan itu polisi menyita beberapa barang bukti, di antaranya satu kapal tanker yang digunakan untuk mengangkut 528 ton solar selundupan dan tiga truk tangki yang masing-masing berkapasitas 16.000 liter. Barang bukti lainnya adalah satu mobil colt diesel dan dua pompa penyedot minyak.

Kepala Polda Jateng Inspektur Jenderal Chaerul Rasjid kepada wartawan di Semarang kemarin mengungkapkan, kegagalan penyelundupan itu berawal dari informasi masyarakat yang mengetahui keberadaan kapal tanker MT Yoto yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, sejak 20 Juni 2005.⁴⁷

Polda Jateng terus menyelidiki kemungkinan keterlibatan oknum Pertamina dan Pelabuhan Tanjung Intan dalam kasus penyelundupan 528 ton solar di Cilacap. Kapolda Irjen Chaerul Rasjid mengungkapkan, siapa pun yang terlibat akan ditindak tegas.

"Polda serius mengusut otak penyelundupan hingga tuntas, sesuai dengan perintah Kapolri. Apalagi saat ini BBM sedang dalam kondisi terbatas. Dalam dua-tiga hari ini kami akan mengecek ke saksi-saksi," jelas Kapolda kepada wartawan sesuai penandatanganan nota kesepahaman mengenai penanganan tindak pidana perbankan di Kantor Bank Indonesia Jl Imam Bardjo Semarang, kemarin.

Terkait hal itu, penyidik Polda telah melayangkan panggilan kepada sejumlah saksi. Antara lain Administratur Pelabuhan (Adpel) Tanjung Intan. Adpel berjanji akan memberikan keterangan pada Kamis (30/6). Saksi lain yang dipanggil adalah pengelola PT Baruna selaku pemilik kapal MT Yoto dan dari Pertamina.

Sementara itu, kemarin Polda menerima hasil uji sampel solar yang dilakukan Pertamina. Hasil tes laboratorium terhadap sampel yang diambil dari tiga truk tangki sitaan tersebut menunjukkan solar telah dioplos dengan bahan lain.

Pertamina mulai meningkatkan pengawasan ketat ke jalur-jalur distribusi. Humas PT Pertamina Unit Pemasaran (UPMS) IV Jateng-DIY Heppy Wulan Sari mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pelanggan, rekanan, dan manajemen internal sejak penyelundupan itu mencuat.

⁴⁷Penyelundupan 528 Ton Solar di Cilacap Digagalkan. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/27/utama/1844166.htm>.

Berdasarkan hasil pengecekan, nama Wijaya Kusuma yang disebut-sebut memiliki delivery order (DO) diduga dicatat CV Teddy Jaya Putra (TJP). PT Pertamina memang memiliki pelanggan yang terdaftar dengan nama Wijaya Kusuma. Namun, bukan berstatus PT dan beralamat di Jl Diponegoro seperti yang tercantum di daftar DO tersebut. Pelanggan yang tercatat adalah CV Wijaya Kusuma yang beralamat di Jl Kolonel Sugiono. "Jadi, bisa disimpulkan bahwa DO yang dibawa CV TJP itu fiktif."⁴⁸

Kebijakan pemerintah Malaysia menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jauh lebih mahal, dimana Malaysia mencapai Rp 4.300 per liter, sementara di Indonesia hanya Rp 2.200, membuat pemerintah mesti ekstra hati-hati terhadap indikasi penyelundupan solar lokal ke negeri jiran tersebut. Sebab, selisih harga yang begitu jauh sangat menggiurkan pelakunya.

Terhadap persoalan ini, bagaimana dengan instansi terkait Kabupaten Sanggau dalam menyikapi serta mencegah indikasi-indikasi penyelundupan itu, mengingat daerah ini berbatasan langsung dengan Malaysia melalui Sarawak. "Kita tetap lakukan pengawasan, namun sejauh ini belum ada imbauan agar kami mengambil sikap tegas mengantisipasi indikasi penyelundupan itu," ujar Plt Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Sanggau, Ade Umar Saleh, menjawab Pontianak Post, kemarin mengenai kekhawatiran ini.

Dia menambahkan, pendistribusian solar selama ini dilakukan langsung ke SPBU yang dijajah dari Pertamina, sehingga tentu pihaknya sulit melakukan pemantauan untuk itu. "Bisa saja indikasi ini ada, di mana ada konsumen dari luar membeli kemudian menyelundupkannya dan menjual ke luar negeri, ini bisa saja terjadi," tandas mantan Kasubdin Perindustrian Disperindagkop tersebut.⁴⁹

Posisi Indonesia yang begitu strategis, diimpit dua benua dan dua samudera, ternyata membuka celah bagi penyelundup minyak dan hasil tambang. Tentu saja, mereka memanfaatkan lemahnya kemampuan aparat dalam menjaga laut agar terhindar dari penyelundupan migas dan tambang ke luar negeri.

⁴⁸ Polda Panggil Adpel Tanjung Intan. Kasus Penyelundupan Solar. <http://www.suaramerdeka.com/harian/0506/29/nas04.htm>.

⁴⁹Malaysia Naikkan Harga, Solar Rawan Diselundupkan. <http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Sanggau&id=92478>.

Tanggal 10 Februari 2002 terjadi percobaan penyelundupan minyak bakar sebanyak 2.600 ton ke Singapura. Upaya ini dapat dibatalkan oleh petugas Bea dan Cukai Batam. Akan tetapi, bagaimana dengan aksi penyelundupan yang luput dari pengawasan petugas.

Penyelundupan bahan bakar minyak sangat jahat sebab si penyelundup mengeruk untung dari selisih antara harga minyak di dalam negeri dan harga di luar negeri. Selisih harga itu sendiri merupakan subsidi pemerintah kepada rakyat agar mampu membeli bahan bakar minyak (BBM). Tahun ini pemerintah masih memberikan subsidi BBM sebanyak Rp 13,5 trilyun dan tambahan Rp 1 trilyun setiap bulan sampai harga minyak dunia turun di bawah 28 dollar AS. Sebelumnya, menurut Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, pemerintah sudah mengeluarkan subsidi sebanyak Rp 1.000 trilyun untuk BBM. Tetapi, itu hanya sia-sia belaka karena diselundupkan atau diselewengkan.

Kerugian negara akibat penyelundupan BBM tak tanggung-tanggung. Selain oleh subsidi, harga BBM sebetulnya masih di bawah biaya produksinya. Sebagai gambaran: biaya produksi premium per liter pada tahun 2001 adalah Rp 2.004,66, minyak tanah sebesar Rp 1.834,90, minyak solar Rp 1.758,26, minyak diesel sebesar Rp 1.721, dan minyak bakar 1.599,81. Harga penjualan minyak bakar adalah Rp 1.560. Selisihnya per liter Rp 39,81. Jadi, jika terjadi penyelundupan minyak bakar sebanyak 2.600.000 liter, kerugian yang ditimbulkan biaya produksi yang telah dikeluarkan Pertamina adalah Rp 103,506 juta. Dorodjatun mengungkapkan, total nilai kerugian negara akibat penyelundupan minyak dari Indonesia mencapai Rp 56 trilyun per tahun, sekitar 5,6 milyar dollar AS.

Salah satu usaha pemerintah mengatasi penyelundupan BBM adalah menghilangkan disparitas harga BBM yang terlalu tinggi, antara harga BBM dalam negeri dan harga di luar negeri. Kebijakan itu cukup ampuh, tetapi ditentang banyak pihak sebab, memang, memberatkan rakyat yang tak lagi mendapat subsidi.

Akhirnya, penghapusan subsidi BBM dilakukan secara bertahap hingga harga BBM dalam negeri dapat disesuaikan dengan harga pasar internasional. Dengan demikian, penyelundupan tak bakal memberi keuntungan kepada si penyelundup. Sebagai catatan: pada tahun 2000 dan 2001 subsidi BBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sekitar Rp 50 trilyun per tahun. Namun, pada tahun 2002, subsidi itu dapat ditekan menjadi sekitar Rp 30 trilyun. Ketika subsidi yang tinggal Rp 13,5 trilyun pada tahun 2003 ditentang masyarakat, pemerintah terpaksa menambahnya Rp 1 trilyun per bulan.

Indonesia tampaknya harus benar-benar serius menangani kasus penyelundupan BBM sebab negeri ini hanya memiliki cadangan minyak terbukti sekitar lima milyar barrel. Cadangan itu akan bertahan hingga sepuluh tahun ke depan saja. Selain itu, kemampuan produksi minyak Indonesia yang hanya 1,3 juta barrel per hari sebenarnya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. Aksi penyelundupan minyak ini tak dapat dicegah, sepuluh tahun kemudian cadangan minyak kita habis tanpa dinikmati secara optimal oleh rakyat banyak. Yang menikmatinya hanya segelintir orang: penyelundup dan pejabat yang terlibat dalam penyelundupan itu. Pada saat itu harga minyak yang harus kita ekspor akan sangat mahal harganya sebab cadangan minyak dunia di Timur Tengah sudah mulai menipis.⁵⁰

4. Penimbunan, Pengoplosan dan Penjualan BBM Ilegal ke Sektor Industri

Praktik kejahatan yang kerap berkaitan dengan BBM di Jawa Timur lainnya adalah praktik penimbunan BBM. Praktik penimbunan tentu membuat persediaan BBM di sebuah wilayah terganggu sehingga harga komoditas ini naik di pasar tidak resmi. Praktik kejahatan ini di Jawa Timur telah dilaporkan berbagai media sejak 2001 lalu. Pengusaha yang melakukan praktik penimbunan biasanya melakukan praktik ilegal lainnya, yaitu menjual BBM kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak, misalnya ke sektor industri atau melakukan proses pengoplosan, misalnya mencampur minyak solar yang harganya lebih mahal dengan minyak tanah. Tujuan praktik ilegal ini tentu saja adalah bagaimana dapat menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

Seperti kasus penyelundupan, praktik penimbunan, pengoplosan, dan penjualan BBM ilegal ke sektor industri ini harus melibatkan oknum-oknum Pertamina yang berwenang dalam proses distribusi penyaluran BBM.

Peran aparat penegak hukum atau kepolisian kembali penting untuk menanggulangi praktik tindak kriminal ini. Jaringan kepolisian di seluruh pelosok Indonesia harus dapat melakukan koordinasi

⁵⁰Minyak Rakyat Diselundupkan. Kontrak Freeport Tak Jelas. <http://relawan.net/wmview.php?ArtID=521>. 13 Agustus 2004 - 13:15. sumber: <http://www.djgsm.esdm.go.id/id/berita/media/33,498,id.1.html> .

dengan para pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk aktif berperan melakukan pengawasan distribusi BBM termasuk minyak solar. Aparat Polri juga dapat meminta SPBU agar tidak melayani konsumen yang membeli BBM dengan membawa drum atau jerigen.

Sementara itu, jajaran Pertamina harus memperketat pengawasan dan mempertegas pemberian sanksi bagi para pelaku kriminal di lapangan, misalnya kepada para pemilik SPBU yang melanggar. Bagi SPBU yang melanggar, Pertamina dapat memberikan sejumlah sanksi, mulai dari sanksi tidak lagi menerima jatah solar (apakah selama satu bulan, dua bulan, atau empat bulan) atau bahkan menghentikan jatah solar sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Sebuah gudang yang kerap digunakan untuk mengoplos minyak tanah dan residu menjadi solar dibongkar jajaran Polsek Tandes, Surabaya. Polisi menemukan 70 ton solar tanpa *Delivery order* dari Pertamina. Satuan Khusus Kepolisian Sektor Kota Tandes, Surabaya Utara, Jawa Timur, Rabu (5/9), membongkar sebuah gudang di kawasan Margorejo, Surabaya. Gudang tersebut diduga menjadi tempat penimbunan dan pengoplosan bahan bakar minyak jenis solar. Dugaan polisi ternyata benar. Dari gudang tersebut, polisi menemukan 70 ton solar yang tak dilengkapi *delivery order* dari Pertamina.

Menurut Kepala Polsekta Surabaya Utara Ajun Komisaris Polisi Mulyani, penimbunan solar terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat sekitar gudang. Setelah diselidiki, gudang milik Agung itu ternyata kerap digunakan untuk mengoplos minyak tanah dan residu menjadi solar.

Di depan polisi, Agung mengaku tak mengetahui asal-usul 70 ton solar itu. Meski begitu, polisi tetap mengusut kasus tersebut, termasuk memeriksa Jumadi--sopir tanki yang kerap membawa solar. Jumadi mengaku kerap mengalirkan atau membocorkan solar ke gudang milik Agung. Menurut Mulyani, sopir itu mengaku telah lama menjalankan aksi penyaluran solar ilegal. Setiap hari ia mengambil 200 liter solar per tanki. Untuk itu, Mulyani akan mengusut kasus itu hingga tuntas.⁵¹

Kepolisian Wilayah Surabaya Taman menggerebek sebuah gudang tempat penimbunan solar di Gresik, Jawa Timur, baru-baru ini. Dari gudang ini, polisi menemukan solar dan residu sebesar 32.200 liter tanpa dilengkapi stiker *delivery order* dari Pertamina. Polisi juga mengamankan delapan mobil tangki pengangkut oli ilegal tersebut.

⁵¹Polisi Surabaya Membongkar Penimbunan Solar. <http://www.liputan6.com/fullnews/19446.html>. 5/9/2001 22:56 .

Kepala Polwil Surabaya Taman Komisaris Besar Polisi Djoko Trisno mengatakan, polisi sudah lama memata-matai lokasi penimbunan solar milik Tori, warga Ujung Pangkah tersebut. Setelah digeledah, polisi menemukan 128 drum solar dan 33 drum residu. Tori mengaku, solar itu diperoleh dari ceceran kapal-kapal besar yang singgah di Pelabuhan Gresik. Selanjutnya, Tori menjual solar pada para nelayan di wilayah Gresik.

Sementara itu, dari pengakuan para sopir terungkap bahan bakar minyak itu bakal dipasarkan ke beberapa kawasan industri di Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto. Untuk pengusutan selanjutnya, polisi akan memeriksa para pemilik mobil. Sebab, polisi berpendapat para sopir tak akan berani mengangkut barang tanpa dilengkapi surat resmi.⁵²



⁵²Penimbunan Solar di Gresik, Jawa Timur, Digerebek Polisi. <http://www.liputan6.com/fullnews/19446.html>. 6/9/2001 19:39

Lampiran 2: Tanggung-jawab Pengawasan antar Organisasi

Organisasi/ Institusi	Tugas dan Fungsi	Kewenangan	Di bawah Koordinasi	Melapor kepada
Badan Usaha Diberi Penugasan PSO/ Pertamina	Menyiapkan saluran distribusi yang ditugaskan oleh BPH Migas. Bertanggungjawab terhadap kelancaran pendistribusian BBM sesuai dengan penugasan	Melakukan pembinaan terhadap jaringan distribusi. Memutuskan hubungan kerja dan memberikan sanksi administratif pada penyalur.	BPH Migas	Menteri ESDM
Sukarelawan (BBM Watch)	Mengkoordinasikan pemantauan dan pengawasan oleh publik terhadap jaringan distribusi. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi publik terhadap jenis BBM	Mengevaluasi dan mengkomunikasikan hasil pemantauan dan pengawasan kepada stakeholder	Independen	Instansi terkait
PPNS (Penyelidik Pegawai Negeri Sipil) Departemen ESDM	Melaksanakan penegakkan hukum sesuai dengan UU No. 22/2001	Melakukan penyidikan bersama-sama dengan Polri dalam rangka pendistribusian jenis BBM tertentu	Menteri ESDM	Menteri ESDM
Departemen Perindustrian (Deperin)	Melaksanakan pengembangan dan pembinaan industri termasuk industri yang menggunakan jenis BBM tertentu.	Menetapkan jenis industri. Memberikan dan mencabut ijin usaha.	Menteri ESDM melalui BPH Migas	Menteri Perindustri an (Menper- in)
Pemda Kabupaten/ Kota	Melaksanakan pengawasan pendistribusian jenis BBM tertentu di wilayah hukumnya.	Menetapkan dan melakukan pengawasan pelaksanaan HET. Melakukan pengawasan terhadap alokasi pendistribusian jenis BBM tertentu	Menteri Dalam Negeri	Menteri Dalam Negeri

**Lampiran 3: Organisasi Penegakan Hukum Jika Ada
Penyelewengan Pendistribusian BBM**

Organisasi/ Institusi	Tugas dan Fungsi	Kewenangan	Di bawah Koordinasi	Melapor kepada
Departemen ESDM/ Ditjen Migas	Menyusun kebijakan makro. Distribusi dan pengawasannya. Menetapkan volume distribusi BBM. Menetapkan kebijakan harga	Memberikan dan mencabut ijin usaha. Menerapkan sanksi administratif	Menteri ESDM	Menteri ESDM
BPH Migas	Melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM. Menetapkan alokasi volume BBM Menyusun sistem distribusi BBM.	Merekomendasikan pencabutan ijin usaha. Mencabut ijin wilayah distribusi niaga.	Menteri ESDM	Presiden melalui Menteri ESDM
Polri	Penegakkan hukum	Penyidikan dan penyusunan BAP dalam rangka pendistribusian jenis BBM tertentu.	Menko Polhukum	Kapolri
Kejaksaan Agung	Menindaklanjuti hasil penyidikan dari Polri	Melaksanakan prosedur penuntutan hukum.	Jaksa Agung	Jaksa Agung
Tim DU	Koordinasi terhadap pengawasan dan pengendalian terhadap dampak kenaikan harga BBM. Koordinasi pengawasan dan pengendalian penanggulangan penyalahgunaan BBM.	Koordinasi pengawasan pengendalian pemantauan di lapangan. Menghimpun data maupaun informasi yang diperlukan dari semua instansi maupun pemerintah. Membuat laporan hasil temuan kepada badan usaha yang diberi penugasan PSO dan kepada Polri.	Menko Polhukam	Menko Polhukam

Lampiran 4 Persamaan Matematis Model *Stock-Flow*

init BACKLOG_CONSUMPTION = 0

flow BACKLOG_CONSUMPTION = $-dt * \text{reduction_of_backlog}$
 $+dt * \text{increase_in_backlog}$

doc BACKLOG_CONSUMPTION = Level ini menunjukkan tingkat backlog yaitu kebutuhan atau konsumsi masyarakat yang belum terpenuhi. Backlog terjadi sebagai akibat lambatnya pengisian SPBU.

init BUNKER_SERVICE = $723288 * .3$

flow BUNKER_SERVICE = $-dt * \text{outflow}$
 $+dt * \text{delivery_to_BS}$

init DEPOT = 238685

flow DEPOT = $+dt * \text{delivery_to_DEPOT}$
 $-dt * \text{transport_to_SPBU}$

init Industry = 350000

flow Industry = $+dt * \text{growth_in_Industry}$

init ISG = 723288

flow ISG = $-dt * \text{delivery_to_BS}$
 $+dt * \text{shipment_to_ISG}$
 $-dt * \text{delivery_to_DEPOT}$

init Population = 5000000

```

flow  Population = +dt*growth_in_Population

init  Price = initial_International_Price

flow  Price = +dt*Change_In_Price

doc   Price = The price of the product. Initially equal to $100/unit.

init  SPBUs = 238685/10

flow  SPBUs = +dt*transport_to_SPBU
      -dt*consumption

aux   Change_In_Price = (Indicated_Price-
      Price)/Price_Adjustment_Time

doc   Change_In_Price = Price adjusts to the indicated level over the
      Price Adjustment Time.

aux   consumption =
      (demand+BACKLOG_CONSUMPTION)*fraction_of_desired_c
      onsumption

aux   delivery_to_BS =
      (ISG*ratio_n_time_to_BS(1))/ratio_n_time_to_BS(2)

aux   delivery_to_DEPOT = DELAYMTR(Orders_Placed,
      delivery_delay,3,0)*IF(ISG>=DELAYMTR(Orders_Placed,
      delivery_delay,3,0),1,0)

aux   growth_in_Industry = Industry*growth_indust_ratio

aux   growth_in_Population = Population*growth_pop_ratio

```

aux increase_in_backlog = IF(delayed_delivey>0,
delayed_delivey/time_to_backlog, 0)

doc increase_in_backlog = Jika delayed delivery lebih besar dari 0, maka delayed delivery akan menambah backlog. Karena proses ini memerlukan waktu tertentu, backlog dihitung dengan cara dibagi dengan time to backlog

aux outflow = BUNKER_SERVICE/time_to_outflow

aux reduction_of_backlog = IF(delayed_delivey<=0, -
delayed_delivey/time_to_backlog, 0)

doc reduction_of_backlog = Jika delayed delivery negatif, yang artinya Pertamina mengirimkan minyak tanah lebih cepat dari permintaan masyarakat, maka backlog akan menurun. Penulisan minus di depan delayed delivery untuk memastikan backlog berkurang. Jika penulisan tanpa notasi negatif, maka stock (backlog) akan menghasilkan negative outflow. Akibatnya, bukan outflow yang terjadi tetapi inflow (double inflow).

aux shipment_to_ISG = DELAYPPL(ISG_stock_gap,
delay_shipment,0)

aux transport_to_SPBU =
DEPOT/delay_transp*deliv_delay_effect_on_SPBU

aux bribery = price_effect_on_profit*bribery_ratio

aux delayed_delivey = demand-consumption

doc delayed_delivey = This auxiliary gives us the gap between the demand for products and the actual shipments

aux deliv_delay_effect_on_SPBU =
 GRAPH(delivery_delay/50,0,0.1,[0.1,0.13,0.17,0.21,0.27,0.31,0.4,0.5,0.59,0.69,0.82"Min:0;Max:1;Zoom"])

aux delivery_delay = 0.1/law_enforcement*delay_time

aux demand = RT_Demand

aux DemandSupply_Balance = Intl_Demand/Intl_Supply

doc DemandSupply_Balance = The balance between demand and supply, expressed as a dimensionless ratio.

aux desired_stock = demand*day_pipeline_in_stock

aux Effect_Of_DemandSupply_Balance_On_Price =
 DemandSupply_Balance^Sensitivity_Of_Price_To_DemandSupply_Balance

doc Effect_Of_DemandSupply_Balance_On_Price = The effect of the demand/supply balance on price is a power function of the demand/supply balance. The higher the sensitivity of price to the demand/supply balance, the greater the change in price induced by any imbalance.

aux fraction_of_desired_consumption =
 GRAPH(max_consumption_rate_to_demand/10,0,0.2,[0,0.235,0.38,0.53,0.64,0.72,0.77,0.8,0.82,0.826"Min:0;Max:1"])


```

aux   Indicated_Price =
      Price*Effect_Of_DemandSupply_Balance_On_Price

doc   Indicated_Price = Market makers raise the indicated price above
      the current level when demand exceeds supply, and lower it when
      supply exceeds demand.

aux   Indust_need = Industry*industry_need_ratio

aux   Intl_Demand =
      Reference_Demand*(Price/Reference_Price)^Demand_Elasticity

doc   Intl_Demand = Demand is given by a constant elasticity demand
      curve. Demand equals the reference level at the reference price.

aux   Intl_Supply = Reference_Supply *
      (Price/Reference_Price)^Supply_Elasticity

doc   Intl_Supply = Supply is given by a constant elasticity supply
      curve. Supply equals the reference supply at the reference price.

aux   ISG_stock_gap = MAX(0, desired_ISG_stock-
      reguler_time_order)

aux   law_enforcement =
      GRAPH(bribery/law_enforcement_ratio,0,0.1,[0.85,0.65,0.42,0.3,
      0.18,0.13,0.07,0.05,0.03,0.02,0.01"Min:0;Max:1;Zoom"])

aux   max_consumption_rate = SPBUs/consumption_time

```

doc max_consumption_rate = This variable tells us the maximum number of widgets per week our company can manage to ship, taking into account the current inventory and the shipment time

aux max_consumption_rate_to_demand =
max_consumption_rate/demand

doc max_consumption_rate_to_demand = Ini adalah rasio maksimum konsumsi yang dibandingkan dengan demand.

aux ordering_to_replace_gap = stock_gap/correction_speed

aux Orders_Placed = MAX(0,
consumption+ordering_to_replace_gap)

dim potential_oil_demand = (i=1..2)

aux potential_oil_demand =
(RT_need*oil_need_ratio(1))|i=1;(Indust_need*oil_need_ratio(2)
)|i=2

aux price_effect_on_profit =
GRAPH(price_gap/Domestic_Price,0,0.1,[0,0.6,1.1,1.7,2.5,3.3,4.
2,5.1,6.1,7.5,9.6"Min:0;Max:10;Zoom"])

aux Price_Flux = STEP(50,75)-STEP(50,100)

aux price_gap = Reference_Price-Price

aux reguler_time_order = TIMECYCLE(1, regular_time
,1)*(ISG+DEPOT+BUNKER_SERVICE)

aux RT_Demand = potential_oil_demand(1)

```

aux    RT_need = Population*RT_need_ratio
aux    stock_gap = desired_stock-SPBUs
aux    the_days_where_people_in_queue = SPBUs-queue_limitation
const  bribery_ratio = 10
const  consumption_time = 1
const  correction_speed = 3
const  day_pipeline_in_stock = 3
const  delay_shipment = 23
const  delay_time = 20
const  delay_transp = 3
const  Demand_Elasticity = -0.25
doc    Demand_Elasticity = The elasticity of demand (the fractional
      change in demand for a given fractional change in price)
const  desired_ISG_stock = 723288+(723288*10%)
const  Domestic_Price = 34
const  growth_indust_ratio = 0.007/12/30
const  growth_pop_ratio = 0.01/12/30
const  industry_need_ratio = 0.15
const  initial_International_Price = 34
const  law_enforcement_ratio = 50
dim    oil_need_ratio = (i=1..2)
const  oil_need_ratio = ([7,25])

```

doc oil_need_ratio = 1= kebutuhan minyak solar RT (Rumah Tangga); 2= kebutuhan minyak solar industri.

const Price_Adjustment_Time = 30

doc Price_Adjustment_Time = Price adjusts to the indicated level over this interval.

const queue_limitation = 16000

dim ratio_n_time_to_BS = (i=1..2)

const ratio_n_time_to_BS = ([0.9,7])

const Reference_Demand = 100

doc Reference_Demand = Reference Demand is the demand generated at the reference price.

const Reference_Price = 45

const Reference_Supply = 100

doc Reference_Supply = Reference supply is units/period.

const regular_time = 23

const RT_need_ratio = 0.001

const Sensitivity_Of_Price_To_DemandSupply_Balance = 1

doc Sensitivity_Of_Price_To_DemandSupply_Balance = Determines the response of the indicated price to imbalances between demand and supply.

const SPBU_Safety_Stock = 24000

const Supply_Elasticity = 0.5

doc Supply_Elasticity = The elasticity of supply (the fractional change in supply for a given fractional change in price)

const time_to_backlog = 5

doc time_to_backlog = Ini adalah penunjuk waktu delay pengiriman yang berakibat pada penambahan atau pengurangan backlog.

const time_to_outflow = 2



Lampiran 5

Pertanyaan-pertanyaan untuk Wawancara Mendalam

Pertanyaan untuk Pertamina Unit Pemasaran V Surabaya

1. Berapa banyak pasokan dan konsumsi BBM (diuraikan menurut jenis masing-masing) untuk Jawa Timur per tahun sejak tahun 1995 s.d. 2004? Berapa besar estimasi kebutuhan dan kemampuan pasokan dalam tahun 2005-2010?
2. Berapa kapasitas fasilitas timbun yang ada di Jawa Timur dan untuk distribusi konsumsi berapa hari? Apakah semua fasilitas itu milik Pertamina? Apa saja keunggulan, kelemahan, peluang, dan kendala/tantangan yang dihadapi selama ini dengan sistim pasokan dan distribusi tersebut? Bagaimana rencana UP V kedepan?
3. Di wilayah kerja UP V Surabaya terdapat 1(satu) Agen Bunker, yaitu PT Lianinti Abadi Cabang Denpasar Bali dan 9 (sembilan) Bunker Service, yaitu PT Binatama Samudera Surya, PT Primkopal Makro Lantamal III, PT Usaha Maritim Jakarta, PT Harumax Persada Yala Kencana, PT Kartika Jasa Karya, PT Insam Jaya Reksa, PT Gelora Insan Samudera, PT Pande Astika Dharma, dan PT Tulus Bahagia. Apa perbedaan Agen Bunker dan Bunker Service? Berapa kapasitas tampung dan distribusi mereka masing-masing, serta kedaerah mana saja untuk masing-masing Bunker Service itu? Bagaimana hubungan serta sistim kerja antara Pertamina dengan mereka?
4. Ada berapa perusahaan industri dan terletak didaerah kota/kabupaten mana, yang dipasok BBM dan berapa banyak per tahunnya selama 1995 s.d. 2004? Dan berapa banyak untuk keperluan transportasi?
5. Bagaimana sistim pengawasan yang diterapkan Pertamina UP V atas pasokan dan distribusi untuk menjamin BBM benar-benar sampai kepada rakyat pemakai?

Pertanyaan kepada Pertamina

1. Bagaimana strategi dan kebijakan bisnis bahan bakar minyak dan gas bumi (BBMG) khususnya Premium, Solar, Minyak-tanah, dan gas bumi di Indonesia selama Pertamina berstatus PN dan bagaimana selanjutnya setelah berstatus PT (Persero)?
2. Apa yang menjadi dasar perhitungan kebutuhan (demand) dan pasokan (supply) BBMG (premium, solar, minyak-tanah, dan gas bumi) bagi satu wilayah seperti Jawa Timur dan bagaimana teknis pasokan serta distribusinya di wilayah tersebut?
3. Berapa besar permintaan dan pasokan serta distribusi premium, solar, minyak tanah dan gas bumi bagi Jawa Timur dalam 20 tahun terakhir (1984 – 2003)? Berapa besar estimasi kebutuhan dan kemampuan pasokan BBMG tersebut bagi Jawa Timur untuk 10 tahun kedepan (2004 – 2013)?
4. Apa saja yang merupakan rintangan dan atau kendala dalam melaksanakan pasokan dan distribusi BBMG tersebut bagi Jawa Timur selama 10 tahun terakhir (1994 – 2003) dan bagaimana mengatasinya? Bagaimana Pertamina mengantisipasi kemungkinan timbulnya rintangan dan/atau kendala dalam masa 20 tahun mendatang?
5. Apa pengaruh positif serta manfaat yang diperoleh, dan pengaruh negatif serta akibat yang dirasakan Pertamina dalam kaitannya dengan perubahan status dari PN menjadi PT (Persero)?

Pertanyaan untuk Pemodelan

1. Siapa yang menjadi pengambil keputusan dalam kegiatan pengadaan minyak solar di sini?
2. Siapa yang mendanai?
3. Berapa lama proses pengambilan keputusan diambil?
4. Apakah pernah tertunda?
5. Apa alasan penundaan tersebut?
6. Apa kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi pengadaan minyak solar?
7. Apa faktor yang paling kuat yang membuat pengambil keputusan menjual minyak solar?
8. Apa yang isu yang paling problematik?
9. Adakah pengalaman terdahulu yang serupa dengan masalah tersebut?
10. Adakah satu preseden atau *template* yang dapat diikuti dalam pengambilan keputusan tersebut?
11. Apa nilai yang paling berharga dalam keputusan tersebut?
12. Apa yang menjadi ukuran kinerja perusahaan selama ini?
13. Keputusan apa saja yang digunakan untuk mengelola kinerja tersebut?
14. Apa informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan rutin?
15. Ceritakanlah lima sampai sepuluh faktor ketika Anda yang menjadi landasan keputusan? Apa artinya?
16. Menurut Anda, apa yang mempengaruhi faktor-faktor tersebut?
17. Apakah ada saling keterkaitan di antara faktor-faktor tersebut?

18. Jika ada, yang mana keterkaitan tersebut?
19. Dalam bentuk apa keterkaitan tersebut?
20. Mengapa keterkaitan tersebut terjadi?
21. Mana yang dianggap sebagai informasi?
22. Mana yang disebut sebagai keputusan?
23. Apa masukan dan keluarannya?
24. Apa yang dianggap sebagai kunci keberhasilan?
25. Mengapa dianggap berhasil? Tolong jelaskan lebih jauh!

